

e-news letter

OKTOBER II 2020

PKS PARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Lomba Kitab Kuning Ke-IV
Tahun 2020

**PERSEMBAHAN
PKS UNTUK
PARA
SANTRI**

مسابقة قراءة الكتاب فتح المعين



Fraksi PKS menyadari bahwa membangun negara ini tidak bisa sendiri dan ada banyak pihak yang telah berkontribusi dari dulu hingga kini. Atas dasar pemahaman tersebut kami senantiasa membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong hadirnya program serta kebijakan yang pro kerakyatan, pro keumatan dan pro kebangsaan

CATATAN REDAKSI

fraksi.pks.id | Ahad 25 Oktober 2020

fraksi.pks.id [Fraksi PKS DPR RI](#) [fraksipsdprri](#) [@fpksdprri](#) [PKS TV DPR RI](#)



Fraksi PKS 16 Tahun Mencintai & Merawat Indonesia

landas (take off) memberikan kontribusi yang maksimal bagi bangsa dan negara.

Dalam sebuah literatur Perkembangan kognitif usia 16 tahun diantaranya mampu memberi penalaran yang semakin logis. Mencoba melihat dari berbagai sisi, tidak hanya satu sudut pandang saja. Mencoba untuk menyelesaikan masalah lalu dijadikan pembelajaran dan Mempertahankan keinginannya yang dibarengi dengan alasan.

PKS sejak awal dengan tegas menyatakan diri sebagai Partai Oposisi, tentu hal ini teresonansi oleh Fraksi PKS sebagai kepanjangan partai dengan beragam sikapnya di Parlemen. Sikap oposisi diambil sadar awal dalam penalaran serta pertimbangan yang logis, sebelum euphoria pembentukan Kabinet Indonesia Maju terbentuk dan polarisasi di parlemen terjadi. Sebagai bagian dari amanat demokrasi menjadi garda terdepan melaksanakan fungsi pengawasan yang optimal (check and balances).

Atas dasar itu maka selama satu tahun terakhir kami mendorong Pemerintah bersikap sigap dan cepat dalam

penanganan Covid 19, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan semua kelas utamanya kelas III, mendorong pembentukan Hak Angket untuk mengatasi sangkarut Asuransi Jiwasraya demi hadirnya tata kelola keuangan yang semakin baik, mendesak penurunan Harga BBM ditengah merosotnya harga minyak dunia dan Menolak Kenaikan Bea Materai dari Rp 6000 menjadi Rp 10.000.- Semuanya didasarkan atas analisis yang logis dengan mencoba melihat dari berbagai sisi dan tidak hanya satu sudut pandang saja.

Fraksi PKS menyadari bahwa membangun negara ini tidak bisa sendiri dan ada banyak pihak yang telah berkontribusi dari dulu hingga kini. Atas dasar pemahaman tersebut kami senantiasa membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong hadirnya program serta kebijakan yang pro kerakyatan, pro keumatan dan pro kebangsaan. FPKS bersama sejumlah komponen dan lembaga negara menginisiasi Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) 2020 bagi seluruh Anggota

Legislatif PKS dari pusat hingga kabupaten dan kota. Mencoba untuk menyelesaikan masalah dan bersinergi dengan sejumlah pihak lalu dijadikan pembelajaran.

Dalam rangka memperingati jasa para pahlawan FPKS mengadakan Lomba Baca Text Proklamasi Mirip Bung Karno dan Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa. Selain itu dalam aspek keumatan FPKS PKS mempelopori dan satu-satunya Fraksi yang mengadakan Lomba Baca Kitab Kuning setiap Hari Santri tanggal 22 Oktober. Tahun ini inginjak penyelenggaraan ke IV yang diikuti oleh ratusan santri dari berbagai wilayah Indonesia.

Dalam konteks Internasional FPKS melanjutkan sejarah baik tahun – tahun sebelumnya, ditahun ini FPKS menjadi tuan rumah Penyelenggaraan pertemuan International Islamic Forum of Parliamentarians (IIFP) ke-4 di Jakarta. Fraksi PKS sebagaimana misinya ingin turut menjaga wibawa bangsa dan negara di mata internasional, melalui peran diplomasi yang menjadi bagian dari tugas DPR. Meningkatkan kontribusi

pemikiran strategis dalam pengokohan kehidupan berbangsa dan bernegara.

FPKS di Usia 16 tahun ini tetap mempertahankan keinginannya yang dibarengi dengan alasan. Berkomitmen dan Konsisten dalam sikap dan perbuatan, yang didasari atas rasa cinta yang besar kepada Indonesia dan didorong oleh keinginan luhur; Menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Menolak dengan komunisme sebagaimana TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Terakhir FPKS menolak regulasi yang mendorong eksploitasi sumber daya alam (SDA) dengan meminggirkan hak-hak rakyat Indonesia seperti buruh, petani, nelayan, UMKM dan lainnya.

Terakhir, doakan seluruh Anggota FPKS tetap istiqomah dalam kebaikan dan komitmen menghadirkan keberpihakan untuk rakyat Indonesia. Bisa jadi tidak ada lilin kecil atau kue peneman milad, karena doa dari seluruh rakyat Indonesia lebih dari cukup menjadi bekal dalam kami berjuang.

Alhamdulillah Fraksi PKS DPR RI telah genap 16 tahun berkiprah di Senayan. Waktu yang relatif muda bagi sebuah partai politik, masih ada banyak catatan dan harapan yang belum tertunaikan. Bersyukur rakyat Indonesia masih memberi kepercayaan kepada Fraksi PKS untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasinya selama ini.

Jejak usia sebuah organisasi seringkali dinisbatkan seperti perkembangan hidup manusia. Fraksi PKS di usia 16 tahun sejinatya seperti di tahap akhir pertumbuhan dari anak menjadi remaja. Bersiap lepas



Peringati Hari Santri 2020

Fraksi PKS Adakan Lomba Baca Kitab Kuning

Jakarta (22/10) – Setelah mengadakan lomba biografi tokoh bangsa beberapa pekan lalu, PKS kembali menginisiasi agenda kreatif dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2020 yang tepat jatuh pada tanggal 22 Oktober ini. Dalam hal ini, Fraksi PKS DPR RI akan menyelenggarakan lomba baca Kitab Kuning Tingkat Nasional yang ke-IV.

Launching Lomba Baca Kitab Kuning dilaksanakan hari ini, Kamis (22/10) melalui Webinar dengan menghadirkan sejumlah narasumber baik dari internal maupun eksternal PKS antara lain Salim Segaf Aljufri (Ketua MS PKS), Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR), Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi PKS DPR), dan Ahmad Zahro (Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang)

Peringati Hari Santri 2020

Habib Salim Ajak Masyarakat Gigih Perkuat Kedaulatan Bangsa

untuk mencapai kedaulatan bangsa, para ulama dan santri berhasil menorehkan tinta emas dalam perjuangan melawan penjajahan. Para ulama dan santri yang merupakan orang-orang berilmu berhasil menoreh emas dalam melawan penjajahan. Sehingga, ulama menjadi orang yang paling disegani oleh kalangan masyarakat”

Habib Dr. SALIM SEGAF ALJUFRI, MA

Ketua Majelis Syuro PKS

Jakarta (22/10) — Ketua Majelis Syuro’ Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al Jufri dalam Launching Lomba Kitab Kuning 2020 Fraksi PKS DPR RI mengutarakan bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan besar.

Habib Salim dalam acara yang dilakukan secara virtual ini mengungkapkan, dalam menghadapi tantangan

tersebut, masyarakat perlu memperhatikan kegigihan dalam mencapai kedaulatan bangsa.

“Dengan adanya tantangan-tantangan yang lebih besar, memperlihatkan kegigihan masyarakat dalam mencapai kedaulatan bangsa” jelas Mantan Menteri Sosial era Presiden SBY ini.

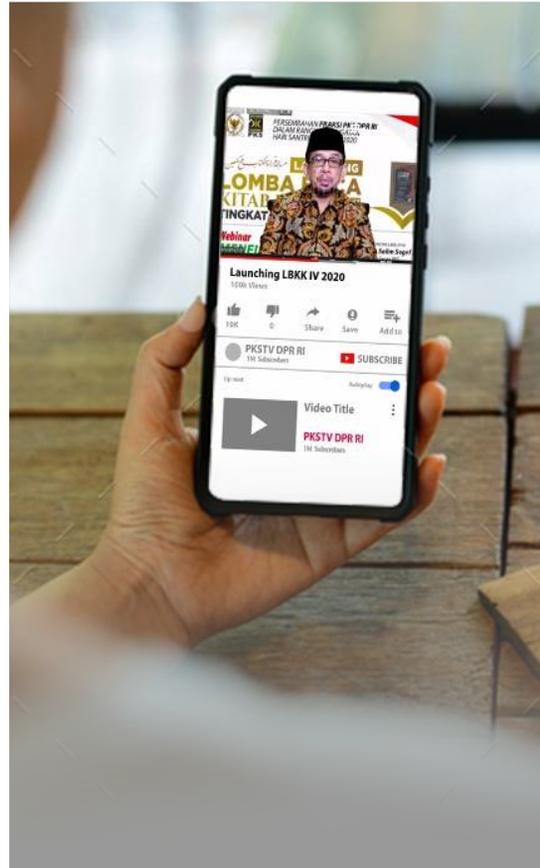
Tak hanya itu, Habin Salim juga mengungkapkan

bahwasanya untuk mencapai kedaulatan bangsa, para ulama dan santri berhasil menorehkan tinta emas dalam perjuangan melawan penjajahan.

“Para ulama dan santri yang merupakan orang-orang berilmu berhasil menoreh emas dalam melawan penjajahan. Sehingga, ulama menjadi orang yang paling disegani oleh kalangan masyarakat” terang Salim Segaf.

Sebagai penutup, Salim Segaf meminta masyarakat untuk meladani langkah-langkah sejarah yang telah diciptakan oleh para ulama dan santri dalam menghadapi tantangan menjadi keharusan untuk kita demi meraih masa depan yang gemilang.

“Mari kita hadapi tantangan ini untuk meraih masa depan yang gemilang dan mari kita perjuangkan bersama” tutur Habib Salim mengakhiri.



Memperingati Hari Santri Nasional

Fraksi PKS Adakan Lomba Baca Kitab Kuning

“Sudah keempat kalinya, Fraksi PKS menyelenggarakan lomba Baca Kitab Kuning ini dalam rangka melestarikan khazanah keilmuan Islam yang telah dituliskan oleh para ulama. Kita semua sadar bahwa peran ulama dan santri di negeri ini sangat terasa, bahkan sebelum republik ini didirikan. Ulama dan santri adalah kelompok yang berperan dalam menanamkan pondasi dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (22/10) – Setelah mengadakan lomba biografi tokoh bangsa beberapa pekan lalu, PKS kembali menginisiasi agenda kreatif dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2020 yang tepat jatuh pada tanggal 22 Oktober ini. Dalam hal ini, Fraksi PKS DPR RI akan menyelenggarakan lomba baca Kitab Kuning Tingkat Nasional yang ke-IV. **Launching Lomba Baca**

Kitab Kuning dilaksanakan hari ini, Kamis (22/10) melalui Webinar dengan menghadirkan sejumlah narasumber baik dari internal maupun eksternal PKS antara lain Salim Segaf Aljufri (Ketua MS PKS), Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR), Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi PKS DPR), dan Ahmad Zahro (Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang).

Menurut Ketua Fraksi PKS

Jazuli Juwaini lomba ini dilaksanakan sebagai wujud kecintaan kepada ulama dan santri. Mengingat, peran ulama dan santri sangat besar bagi negara Indonesia, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.

“Sudah keempat kalinya, Fraksi PKS menyelenggarakan lomba Baca Kitab Kuning ini dalam rangka melestarikan khazanah keilmuan Islam yang telah dituliskan oleh para ulama. Kita semua sadar bahwa peran ulama dan santri di negeri ini sangat terasa, bahkan sebelum republik ini didirikan. Ulama dan santri adalah kelompok yang berperan dalam menanamkan pondasi dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Oleh sebab itu, peran ulama dan santri harus senantiasa dikenang, diteladani, dan dipraktekkan oleh seluruh generasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”, terang Jazuli.

Selain itu, tambah Jazuli, lomba baca Kitab Kuning itu dimaksudkan agar generasi muda Indonesia memiliki kecintaan kepada bahasa Arab, dan pada akhirnya menguasai



ilmu bahasa Arab. Mengingat, literatur Islam yang dibuat oleh ulama-ulama terkemuka mayoritas adalah berbahasa Arab, sehingga diperlukan kepandaian khusus dalam membaca dan memahami teks tersebut.

“Banyak literatur Islam yang belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Maka dari itu, jika semakin banyak generasi bangsa yang pandai bahasa Arab, serta mampu memahami teks-teks Arab, ini akan memberikan sumbangsih

yang luar biasa bagi perkembangan Islam dan ilmu pengetahuan di Indonesia”, tambah Jazuli.

Ke depan, menurut Jazuli Juwaini, Fraksi PKS akan terus berkomitmen untuk menjaga aqidah ahlusunah wal jamaah, sekaligus mensyiarkan kiprah ulama dan santri, agar bangsa Indonesia bisa memahami dan meneladani pikiran dan gagasan mereka, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari negara Indonesia.

Zoominar Peringatan Hari Santri Nasional 2020

Ulama dan Santri Terdepan Dalam Meneguhkan Kedaulatan NKRI

Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS serta keluarga besar PKS saya ucapkan Selamat Hari Santri Nasional. Dengan tegas kita sampaikan bahwa ulama dan santri adalah tulang punggung NKRI. Mereka yang mewariskan NKRI, mereka juga yang menjaga kedaulatannya sejak zaman penjajahan hingga hari ini

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (21/10) - Memperingati Hari Santri 22 Oktober 2020 Fraksi PKS DPR RI menggelar Zoominar dengan Tema Meneladani Peran Ulama dan Santri Dalam Meneguhkan Kedaulatan NKRI pada Kamis, 22/10/2020.

Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Aljufri bersama Ketua Fraksi PKS Dr. H. Jazuli Juwaini mengantarakan Zoominar yang dirangkai

dengan Launching Lomba Baca Kitab Kuning 2020. Bertindak sebagai Narasumber dalam Zoominar ini Dr. HM. Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR/Wakil Ketua Badan Wakaf Pesantren Gontor), Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA, Alhafidz (Rektor Univ Pesantren Darul Ulum, Jombang Jatim) yang mengulas peran sentral ulama dan santri pejuang sejak masa kemerdekaan hingga saat ini

yang harus terus disardarkan kepada generasi bangsa.

Di sana ada nama yang tertulis dengan tinta emas, antara lain KH Hasyim Asyari, KH Ahmad Dahlan, H. Agus Salim, H. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Muzakir, Panglima Besar Sudirman, hingga M. Natsir yang mencetuskan Mosi Integral yang mengembalikan Indonesia dari RIS menjadi NKRI di tahun 1950.

Dalam sambutananya, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengucapkan selamat Hari Santri Nasional sembari memberikan apresiasi dan penghormatan atas jasa dan peran ulama dan santri pejuang dalam meneguhkan kedaulatan NKRI hingga hari ini.

"Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS serta keluarga besar PKS saya ucapkan Selamat Hari Santri Nasional. Dengan tegas kita sampaikan bahwa ulama dan



santri adalah tulang punggung NKRI. Mereka yang mewariskan NKRI, mereka juga yang menjaga kedaulatannya sejak zaman penjajahan hingga hari ini," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri mengatakan bahwa PKS hadir di pentas politik untuk mewarisi keteladanan ulama dan santri pejuang dalam memperjuangkan dan menjaga kedaulatan NKRI. Inilah Indonesia yang kita cintai bersama dengan segala warna keberagamannya, dengan karakternya yang kuat sebagai negara yang berketuhanan sebagai warisan ulama dan pendiri bangsa.

Tak lupa Habib Salim memberikan apresiasi atas iktihar Fraksi PKS yang konsisten menggelar Lomba Baca Kitab Kuning sebagai bagian dari penghormatan

kepada ulama dan santri. Beliau juga berpesan kepada seluruh kader, adeg, dan pejabat publik PKS agar selalu dekat, menjalin silaturahmi, dan meminta nasihat kepada para ulama agar berlimpah keberkahan.

Menurut Jazuli Juwaini, pergerakan kemerdekaan Indonesia bertabur nama besar ulama dan santri pejuang karena memang kesadaran hubbul wathon minal iman diajarkan di pesantren-pesantren sejak dulu. Ketika penjajah hadir maka jiwa-jiwa santri siap berkorban untuk ibu pertiwi. Hingga kini pesantren itu khas mengajarkan islahul umat wa hifuz daulah (perbaikan masyarakat serta penjagaan bangsa dan negara).

Selengkapnya kunjungi Fraksi.pksid

Peringati Hari Santri Nasional,

HNW: Kiai dan Santri adalah Pilar Bangsa Indonesia

“Kiai dan santri kita terdahulu telah menunjukkan sikap cinta kepada negara yang sangat tinggi. Hal ini penting untuk disyiarkan kembali, di tengah kondisi belakangan ini, saat masih banyak isu tentang Islamophobia, mencurigai kelompok Islam, dan mencap santri/kalangan pesantren dengan strotipe yang tidak berdasar. Jadi, salah ahistoris jika ada pihak yang meragukan nasionalisme kelompok Islam, khususnya para kiai dan santri”

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (22/10) – Hidayat Nur Wahid, atau akrab disapa HNW, menyatakan bangsa kiai dan santri adalah pilar utama bangsa Indonesia sehingga peran mereka perlu dihargai dan diteladani. Hal ini disampaikan pada acara launching lomba baca Kitab Kuning Fraksi PKS DPR RI yang dilaksanakan hari ini, Kamis (22/10), melalui Webinar Zoom.

Menurut HNW, salah satu

bentuk penghargaan kepada kiai dan santri adalah dengan ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Mengingat, di tanggal itu, diserukan Resolusi Jihad oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari yang telah mengorbankan semangat santri untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam kesempatan ini, HNW mencertikan asal muasal

tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

“Hari Santri Nasional rencananya ditetapkan pada 1 Muharram. Namun, saya mencetuskan dan mengusulkan bahwa hari santri ditetapkan pada tanggal 22 Oktober. Ini bisa dicek jejak digitalnya. Tahun 22 Oktober lebih cocok karena ada momen Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari. Di sisi lain, apabila ditetapkan tanggal 1 Muharram, hari itu adalah harinya umat Islam sedunia, sehingga dirasa kurang pas jika dijadikan hari santri. Alhamdulillah, berdasar Perpres akhirnya diputuskan hari santri pada tanggal 22 Oktober”, jelas Wakil Ketua MPR RI ini.

Menurut HNW, momen Resolusi Jihad memuat beragam nilai yang bisa diambil oleh para santri dan non-santri. Salah satunya adalah cinta kepada bangsa dan negara Indonesia.

“Kiai dan santri kita terdahulu telah menunjukkan sikap cinta kepada negara yang sangat tinggi. Hal ini penting untuk disyiarkan kembali, di tengah kondisi belakangan ini,



saat masih banyak isu tentang Islamophobia, mencurigai kelompok Islam, dan mencap santri/kalangan pesantren dengan strotipe yang tidak berdasar. Jadi, salah ahistoris jika ada pihak yang meragukan nasionalisme kelompok Islam, khususnya para kiai dan santri”, ujar HNW.

Selain itu, tambah HNW, Resolusi Jihad memberikan keteladanan soal pentingnya ukhuwah. Menurutny, pemahaman para ulama dan kiai yang tinggi dalam keilmuan

Islam, tidak membuat mereka egois, tetapi justru mengutamakan musyawarah, lalu membentuk konsensus.

“Ilmu agama yang mendalam membuat mereka mencintai Indonesia. NKRI justru diselamatkan oleh kiai dan santri melalui ukhuwah dan syura. Semakin tinggi pemahaman agama, seharusnya semakin meningkatkan nasionalisme, serta cinta bangsa dan negara,” tutup HNW.

Webinar Hari Santri Nasional FPKS

Tokoh NU Ajak Teladani Peran Ulama dan Santri demi Kedaulatan NKRI

Nilai-nilai Keteladanan Kyai yang harus diteladani ialah Ikhlas, Santun, Berwibawa, Menguasai Ilmu, Sakti, Sabar, Telaten dan Tawadlu. Ada beberapa nilai patron yang harus diteladani oleh santri yaitu sifat Ikhlas, Patuh, Tawadlu, Sungguh-Sungguh, Berani Berjibaku, Mandiri dan Siap Menjadi Apapun

Prof. Dr. AHMAD ZAHRO Al Hafizh

Rektor Universitas Pesantren Tinggi 'Ulum Jombang

Jakarta (22/10) — Ketua Dewan Penasehat Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Seluruh Indonesia, Ahmad Zahro Al-Hafizh, menyampaikan Nilai-Nilai Keteladanan Ulama dan Santri dalam Meneguhkan Kedaulatan NKRI.

Hal ini disampaikananya, dalam Launching Lomba Kitab Kuning IV Tingkat Nasional 2020, Jakarta, Kamis (22/10) dalam Webinar memperingati Hari Santri Nasional.

"PKS sungguh sangat

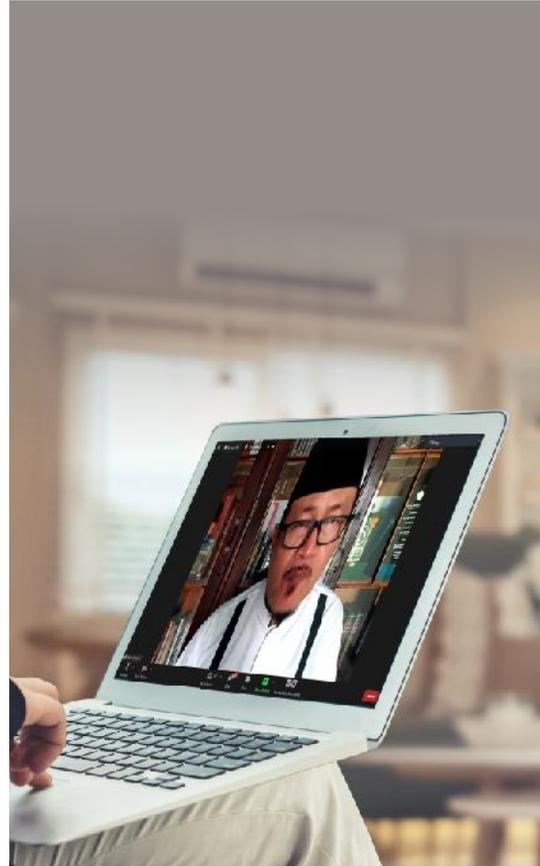
berjasa besar terhadap ruh-ruh dan nilai-nilai pesantren atas terselenggaranya kegiatan lomba baca kitab kuning ini," Ucap Ahmad Zahro.

Disamping itu, Ahmad Zahro juga menyampaikan bahwa Nilai-nilai Keteladanan Kyai yang harus diteladani ialah Ikhlas, Santun, Berwibawa, Menguasai Ilmu, Sakti, Sabar, Telaten dan Tawadlu.

"Ada beberapa nilai patron yang harus diteladani oleh santri yaitu sifat Ikhlas, Patuh,

Tawadlu, Sungguh-Sungguh, Berani Berjibaku, Mandiri dan Siap Menjadi Apapun," terang Ketua Masjid Agung Al-Akbar, Surabaya ini.

Dan yang tak kalah pentingnya, Ia juga menjelaskan mengenai nilai-nilai Perjuangan dan Pengorbanan Kyai & Santri demi NKRI, Jihad konstitusi 22 Juni 45, Resolusi Jihad 22 Okt 45, Totalitas Jihad 10 Nop 45, Pengorbanan Jihad 18 Sep 48, Jihad hadapi pemberontakan PKI 30 sep 65.



Syair Kemerdekaan

Ketua Majelis
Syuro PKS Habib
Dr. Salim Segaf
Aljufri, MA



راية العزرفرفي في سماء 🇮🇩 أرضها وجبالها خضراء

Bendera kemuliaan berkibar di angkasa
hijau daratan dan gunung-gunungnya

إن يوم طوعها يوم فخر 🇮🇩 عظمته الأباء والأبناء

Sungguh hari kebangkitannya ialah hari kebanggaan
orang-orang tua dan anak-anak memuliakannya

كل عام يكون لليوم ذكرى 🇮🇩 يظهر الشكر فيها والثناء

Tiap tahun hari itu menjadi peringatan
muncul rasa syukur dan pujian-pujian padanya

كل أمة لها رمز عز 🇮🇩 ورمز عزنا الحمراء والبيضاء

Tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan
dan simbol kemuliaan kami adalah merah dan putih

لا تبالوا بأنفس وبنين 🇮🇩 في سبيل الأوطان نعم الفداء

Jangan hiraukan jiwa dan anak-anak
demi tanah air alangkah indahnya tebusan itu

Tepat di Hari Santri Nasional

Nevi Zuairina Serahkan Bantuan Demi Kemajuan Pondok Pesantren

Alhamdulillah bantuan untuk pesantren ini dapat direalisasikan untuk beberapa pesantren yang memang perlu untuk di stimulus sehingga berkesempatan mendapat kemajuan pada kualitas pendidikan di Sumatera Barat

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI



Padang (22/10) — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina menyerahkan bantuan untuk kemajuan pesantren Nurul Yakin di Kabupaten Padang Pariaman dan Pesantren Darul Ulum di Kabupaten Pasaman.

Penyerahan simbolis dana sebesar 95 juta rupiah untuk masing-masing kedua pesantren dari dua kabupaten itu ia lakukan pada 21 Oktober 2020. Penyerahan bantuan

simbolis ini juga ia persiapkan untuk menyongsong Hari Santri Nasional yang bertepatan pada hari ini 22 Oktober 2020.

"Alhamdulillah bantuan untuk pesantren ini dapat direalisasikan untuk beberapa pesantren yang memang perlu untuk di stimulus sehingga berkesempatan mendapat kemajuan pada kualitas pendidikan di Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan secara bertahap yang pada akhirnya ada upaya pemerataan pemberdayaan pesantren yang dibantu di seluruh Sumatera Barat", tutur Nevi.

Politisi PKS ini

menjelaskan, memang dalam bantuan-bantuan model pemberdayaan ini sedikit memerlukan waktu dalam realisasinya. Karena segala sesuatunya perlu tahapan dan tidak begitu saja langsung ada segala yang diperlukan. Perlu penyiapan-penyiapan sehingga realisasinya dapat dilakukan.

Anggota Komisi VI ini berharap, agar setiap bantuan yang ada ini dapat berguna dan digunakan secara tepat dan efisien. Sehingga memang ada keberkahan dalam setiap anggaran bantuan yang telah direalisasikan.

"Saya berharap, bantuan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan reguler sekaligus. Peningkatan skill siswa atau santri dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar dapat diwujudkan. Sehingga Persiapan SDM unggul dan berakhlak mulia muncul dari putra-putri asal Sumatera Barat", tutup Nevi Zuairina.



Hari Santri Nasional 2020

Iskan: Momentum Mengingat Sejarah Perjuangan Ulama dan Santri untuk NKRI

Negara ini punya hutang budi dengan pondok pesantren. Pasalnya kiai dan santri sangat berperan dalam proses ikut memperjuangkan kemerdekaan terlebih pada masa pra kemerdekaan. Faktanya Para kiai dan santri telah berkorban materi bahkan nyawapun dipertaruhkan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI



Medan (22/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menyampaikan bahwa momentum HSN (Hari Santri Nasional) merupakan salah satu sejarah atas perjuangan merebutkan kemerdekaan Indonesia.

Maka dari itu, berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 ditetapkan bahwa tanggal 22 Oktober sebagai HSN.

“Jadi tanggal ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai HSN ini muncul karena adanya resolusi jihad, yaitu peperangan 10 November agar santri ikut serta untuk bela negara yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan

Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.” Ujar Iskan.

Menurutnya, Negara ini punya hutang budi dengan pondok pesantren. Pasalnya kiai dan santri sangat berperan dalam proses ikut memperjuangkan kemerdekaan terlebih pada masa pra kemerdekaan.

“Faktanya Para kiai dan santri telah berkorban materi bahkan nyawapun dipertaruhkan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga peran kiai dan santri di Republik ini tidak bisa diremehkan. Bahkan Mereka sudah teruji dari sebelum masa kemerdekaan,” pungkasnya.

Selain itu bisa kita lihat, lanjut Iskan, bahwa pesantren-pesantren di seluruh Indonesia saat ini punya peran penting dalam pemutusan rantai Wabah Covid 19 yang masih merajalela



di Republik ini.

“Banyak pesantren yang telah berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan dampak pandemi Covid-19. Karena Pelajaran dan Teladan yang terbaik dari pesantren yaitu tradisi kedisiplinan yang selama ini diajarkan kepada para santri, serta keteladanan dan sikap kehati-hatian kiai dan pimpinan ponpes tersebut,” terang Iskan.

Dalam menyemarakkan Hari santri nasional 2020 kali ini, Partai Keadilan Sejahtera kembali melaksanakan perlombaan pembacaan kitab kuning tingkat nasional, dan ini sudah memasuki tahun ke 5 sejak ajang perlombaan pembacaan kitab kuning tingkat nasional ini dimulai.

“Kami berharap kegiatan

lomba ini dapat meningkatkan cinta pada kitab kuning dengan membaca kitab, umat belajar dari sumbernya secara langsung. Sehingga, pengetahuan yang didapatkan itu merupakan hasil kajian dari khasanah peninggalan para ulama. PKS ini sebagai partai dakwah, maka PKS sangat menghormati dan menjunjung tinggi tradisi keilmuan melalui kajian kitab kuning karya ulama. Jadi sudah jelas, bahwa Keluarga besar PKS beraqidah ahlus sunnah wal jamaah serta berazam untuk memajukan pesantren di Indonesia.” Imbuh politisi kelahiran Sibuhuan ini.

Selengkapnya kunjungi Fraksi.pksid



IKUTILAH

مسابقة قراءة الكتاب فتح المعين

LOMBA BACA KITAB KUNING^{IV} TINGKAT NASIONAL 2020



Persembahan
Fraksi PKS DPR RI
Dalam Rangka Peringatan
Hari Santri Nasional 2020
dan Peringatan 16 Tahun
Fraksi PKS DPR RI

KITAB YANG DIBACA

Kitab yang dibaca adalah Kitab
Fathul Mu'in Karya Syaikh
Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbari

SYARAT PESERTA

- 1 Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2 Putra/Putri yang tercatat sebagai santri pesantren
- 3 Usia 17 - 25 tahun
- 4 Pendidikan minimal Madrasah Aliyahatau yang sederajat
- 5 Mendapat rekomendasi dari pimpinan pondok pesantren
- 6 Belum pernah menjadi juara 1 - 3 Lomba Kitab Kuning FPKS tingkat Nasional (2016-2018)



BERHADIAH UTAMA UMRAH

Raih Juara Rebut Hadiyahnya

Juara 1	UMRAH	Juara Harapan 1	Rp 15.000.000,-
Juara 2	Rp 25.000.000,-	Juara Harapan 2	Rp 10.000.000,-
Juara 3	Rp 20.000.000,-	Juara Harapan 3	Rp 5.000.000,-

Setiap Peserta akan mendapat sertifikat yang ditanda tangani oleh
Ketua Majelis Syura, Presiden PKS dan Ketua Fraksi PKS DPR RI

AGENDA PELAKSANAAN

Masa Pendaftaran

22 Oktober - 15 November 2020

Babak Penyisihan di 34 Provinsi

Babak Penyisihan akan diselenggarakan antara 16 November 2020 hingga 13 Desember 2020 bertempat di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) di 34 Provinsi se Indonesia.

Babak Final

22 Desember 2020

DEWAN JURI

KH. Syuhada' Syarkun, S.Ag., M.HI.
(Pesantren Tebuireng-Jombang Jatim)

KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA
(Ketua Umum MAPADI)

Dr. KH. Ali Akhmadi, MA, Al-Hafidz
(Ketua BPU-DPP PKS)

NARAHUBUNG

0856-4554-6397
Agus. A. Wahid MG, SPd, M.Sc.
0822-6062-1141
Susiaty Puspasari, B.Sc., M.Sc.
0813-2025-0848
Iman Sulaiman, Lc.
0813-8642-7673
Dr. Suesilowati



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



H. Ahmad Syaikhul
Presiden PKS

Habib Dr. Salim Segaf Aljufri, MA
Ketua Majelis Syura PKS

Setahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'rif Ketua Fraksi PKS DPR: Masih Ada Banyak Evaluasi

“Sebaiknya Jokowi-Ma’ruf Amin menjaga prinsip dan sendi demokrasi, dengan memberikan ruang bagi orang-orang yang berbeda pendapat. Pemerintah tidak perlu represif dalam memperingati orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat”

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (20/10) – Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini memberikan evaluasi atas kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin. Ini disampaikan bertepatan dengan 100 hari kerja di masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf.

Menurut Jazuli, Jokowi dan Ma’ruf Amin seharusnya menjaga prinsip dan sendi demokrasi, dengan memberikan ruang bagi orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat dengan pemerintah.

“Sebaiknya Jokowi-Ma’ruf Amin menjaga prinsip dan sendi demokrasi, dengan memberikan ruang bagi orang-orang yang berbeda pendapat. Pemerintah tidak perlu represif

dalam memperingati orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat” tutur Jazuli dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Selasa (20/10).

Tak hanya itu, Jazuli juga menyentil kinerja DPR yang kurang terbuka dalam pembahasan UU Cipta Kerja dilangsungkan pada bulan ini.

“Masyarakat menganggap pemerintah kurang terbuka dalam membahas undang-undang, sehingga membuat masyarakat salah paham. Ketika undang-undang sudah disahkan, masyarakat belum dapat mengakses dokumennya” jelas Jazuli.

Selanjutnya, Jazuli

menjelaskan beberapa hal yang menjadi sorotannya selama masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Fraksi PKS melihat, saat ini kita mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 3 juta menjadi 27,5 juta. Pengangguran mengalami kenaikan dan kita mengalami kenaikan yang tajam hingga mencapai 6 triliun” ucap Jazuli.

Sebagai penutup, Jazuli berharap Jokowi-Ma’ruf Amin dapat memperbaiki kinerja pemerintahan kedepannya demi mencapai kesejahteraan masyarakat.



Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

Wakil Ketua FPKS: Gaduh, Gagap, Gagal

Sebelum pandemi datang, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 tidak tercapai, tercatat hanya 5,02 persen. Selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, telah menambah utang Rp 2.833,14 triliun sehingga menurut BI total per Agustus 2020 utang Indonesia mencapai Rp6.093 triliun

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Yogyakarta (20/10) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menilai satu tahun Jokowi-Ma'ruf lebih banyak diwarnai dengan kegaduhan dan kegagalan.

Kondisi ini menurut Sukamta, menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah, padahal Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi.

"Para menteri pembantu presiden pada periode ini kesannya hanya pandai bikin gaduh, ada pak Menag yang buat pernyataan larangan cadar dan celana cingkrang, kemudian juga wacanakan sertifikasi penceramah," tandasnya.

Kemudian, lanjut Sukamta, disusul Mendagri soal wacana Pilkada tak langsung kemudian Menkumham yang buat pernyataan kaitkan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin.

"Dan masih banyak lagi menteri yang buat kegaduhan di publik karena statemennya. Termasuk pak Menkes yang sering buat pernyataan yang terkesan sepelekan virus Corona. Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi," papar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Sukamta memandang,

dengan banyaknya kegaduhan, situasi ekonomi yang sudah buruk akan semakin sulit teratasi. Apalagi pemerintah dalam penanganan pandemi ini terlihat gagap dan seadanya.

"Sejak awal Pemerintah sudah terlihat tidak punya konsep, lemah dalam melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). Menurut worldometers jumlah tes yang dilakukan di Indonesia baru 15 per 1000 penduduk, kalah dari Filipina 39 per 1000 penduduk dan India 60 tes per 1000 penduduk. Sekarang yang paling diandalkan vaksin impor. Jika pandemi tidak cepat diatasi, ekonomi akan lebih sulit dipulihkan," terang Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini lebih lanjut menyebut satu tahun Jokowi-Ma'ruf bisa dikatakan gagal penuh target pembangunan terutama di sektor ekonomi. Menurutnya pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi alibi atas kegagalan penuh target.

"Sebelum pandemi datang, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 tidak tercapai, tercatat hanya 5,02 persen. Selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, telah menambah utang Rp 2.833,14



triliun sehingga menurut BI total per Agustus 2020 utang Indonesia mencapai Rp6.093 triliun. Sementara banyak petani dan nelayan yang merjerit karena harga jual yang sangat rendah baik sebelum dan saat pandemi. Saat ini yang jadi fokus pemerintah kejar tayang cari investor supaya ekonomi bisa segera pulih dengan Omnibus UU Cipta Kerja," urainya.

Sukamta berharap Pemerintah segera menyadari kelemahan dan kekeliruan yang

terjadi.
"pilihannya hanya satu harus segera berbenah, selesaikan persoalan prioritas saat ini yaitu pandemi, perkuat ekonomi rakyat dan siapkan lompatan dengan inovasi berbasis teknologi. Orientasi pemerintah harus jadian Indonesia negeri produsen, bukan mengandalkan utang, investasi asing dan impor seperti yang terjadi selama ini," tutup Anggota Badan Anggaran FPKS ini.

Setahun Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

PKS: Ekonomi, Hukum dan Politik Ambyar!

Pemerintah gagal membangun rasa kebersamaan masyarakat. Dengan segala sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah harusnya bisa mencegah keadaan ini agar jangan sampai meluas. Tapi sayangnya Pemerintah terkesan lebih menikmati kondisi ini daripada menyelesaikannya. Sehingga masyarakat kita rentan dari perpecahan

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (20/10) — Hari ini genap satu tahun usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik sebagai presiden di periode kedua, Pemerintahan Jokowi banyak mendapat sorotan.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menyebut secara umum kinerja Pemerintahan Jokowi di bawah standar. Kinerja yang ada sekarang jauh dari janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat.

"Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan. Yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah," ujar Mulyanto.

Secara sosial kemasyarakatan masyarakat Indonesia terbelah menjadi cebong-kadrun. Pemerintah yang seharusnya mendamaikan ternyata malah jadi sumber perpecahan. Hal ini ditandai dengan

adanya kelompok influencer (berpengaruh) di media sosial yang digerakkan sebagai buzzer dan didanai langsung oleh negara. Tak tanggung-tanggung besaran dana untuk influencer dan buzzer ini lebih besar daripada anggaran riset vaksin.

"Pemerintah gagal membangun rasa kebersamaan masyarakat. Dengan segala sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah harusnya bisa mencegah keadaan ini agar jangan sampai meluas. Tapi sayangnya Pemerintah terkesan lebih menikmati kondisi ini daripada menyelesaikannya. Sehingga masyarakat kita rentan dari perpecahan," ujar Mulyanto.

Secara politik, Mulyanto berpendapat, Pemerintah merasa terganggu oposisi, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Pemerintah menganggap oposisi sebagai ancaman sehingga perlu ditiadakan dengan segala cara.

"Demokrasi itu mensyaratkan adanya oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dengan adanya oposisi maka Pemerintah akan



dapat dikontrol dan diawasi kinerjanya", ungkapnya.

Jika di parlemen hampir semua kekuatan partai politik dirangkul menjadi koalisi Pemerintah harusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara.

"Makanya wajar jika kelompok oposisi, yang semula lebih bersifat keummatan, yang disimbolkan dengan tokoh Habib Rizieq Shihab, semakin melebar dengan dideklarasikannya oposisi yang lebih bersifat kebangsaan dalam gerakan KAMI, dengan tokoh sentralnya Prof. Din Syamsudin dan Gatot Nurmantyo," ujar Mulyanto.

Dalam setahun Pemerintahan Jokowi, Mulyanto juga menyoroti tumbuhnya

politik dinasti, dimana anak-menantu Jokowi terjun dalam Pilkada. Secara aturan mungkin pelibatan anak dan mantu dalam hajat pilkada tidak dilarang tapi secara etika dinilai kurang pantas.

"Pada periode ini kita merasakan betul adanya praktik oligarki kekuasaan, dimana ada kerjasama terlarang antara penguasa dan pengusaha dalam melahirkan kebijakan-kebijakan pihak tertentu. Hal ini dapat terlihat dari UU Cipta Kerja yang mendukung para pemodal mengeksploitasi sebesar-besarnya kekayaan negara. Tentu hal ini menjadi warna yang tidak elok dan menyimpang ketidakeadilan dalam wajah perpolitikan di satu tahun pemerintahan Jokowi," imbuh Mulyanto.

1 TAHUN JOKOWI DALAM ANGKA

Rilis dari International Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking 2020, **peringkat daya saing Indonesia turun ke posisi 40** yang pada tahun lalu sempat bertengger di posisi 32 dari 63 negara.



Di antara negara asia pasific, Indonesia peringkat **11** dari **14 negara**



Setahun Kabinet Indonesia Maju

Gagap Hadapi Soal Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Banyaknya catatan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan ini harus jadi alarm bagi pemerintah. Apalagi ini periode kedua Pak Jokowi yang seharusnya jauh lebih baik dari periode pertama. Saat ini yang menjadi pengawas jalannya pemerintahan bukan hanya DPR tetapi juga kekuatan sipil dan media. Jangan anggap remeh kritik dan masukan dari mereka.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (20/10) — Tepat hari ini, Selasa (20/10/2020) usia Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin genap berusia satu tahun. Selama satu tahun pemerintahan, persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan masih menjadi catatan.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyebutkan, seluruh dunia memang tidak siap menghadapi Pandemi Covid-19 sejak akhir 2020. Yang membedakan, papar dia, respons awal setiap

pemerintah negara dalam menghadapi pandemi global ini.

Mufida menyebut, sikap Pemerintah Jokowi-Ma'ruf yang cenderung menggampangkan dan mengabaikan penanganan Covid-19 menunjukkan sikap pemerintahan yang tidak antisipatif dan siap menghadapi Covid-19.

Mufida menyebut, per 20 Oktober 2020 menurut data Worldometers, Indonesia menduduki peringkat 19 dunia, 5 di Asia dan pertama di Asia

Tenggara angka konfirmasi positif Covid-19.

Tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia juga nomor 16 di dunia, nomor 3 di Asia dan nomor satu di Asia Tenggara.

Sementara total tes Covid-19 nomor 25 dunia (4,092,595) dan nomor 6 di Asia. Yang lebih menyedihkan, untuk tes per 1 juta penduduk, Indonesia peringkat 158 dari seluruh negara di dunia.

"Terbukti hingga kini gelombang pertama Covid-19 di Indonesia entah kapan berakhir. Sementara di negara-negara yang sigap responsnya kini semuanya sudah melandai. Sementara negara-negara yang tercatat tertinggi kasus dan angka kematian seperti Brazil dan Amerika Serikat juga pemerintahannya meneyepekan pandemi ini," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10).

Mufida menyebut Pemerintah RI sejatinya sudah dilengkapi petunjuk lengkap dalam UU Kekarantinaan Kesehatan jika terjadi wabah global. Namun, ujar dia,



Pemerintah hanya mengambil hal-hal yang parsial dalam UU Kekarantinaan Kesehatan demi kepentingan tertentu.

"Saat awal pemerintahan melakukan karantina wilayah seperti yang diamanatkan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Tetapi saat mengancam pendemo UU Cipta Kerja, aparat mengancam dengan UU Kekarantinaan Kesehatan," terang dia.

Selain persoalan kesehatan, persoalan ketenagakerjaan dengan disahkannya UU Cipta Kerja menjadi catatan besar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sudah banyak pihak dan pakar yang menyebutkan UU Cipta Kerja cacat secara prosedural dan materi tetapi Pemerintah ngotot tetap mengesalkan UU ini di tengah pandemi Covid-19.

"Pembahasannya yang tidak transparan sejak awal, saat diputuskan dan persoalan yang masih mengikuti terkait draf mana yang resmi usai diputuskan jelas mengindikasikan UU Cipta Kerja ini bermasalah. Belum lagi bicara substansi isi yang justru tidak memberikan rasa aman dan layak bagi pekerja sebagaimana rekomendasi ILO," papar dia.

Mufida menyebutkan, catatan terkait kesehatan dan ketenagakerjaan bukan hanya soal penanganan Covid-19 dan UU Cipta Kerja. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, semrawutnya program Kartu Prakerja, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga menunjukkan kebijakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf yang bermasalah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Ketahanan Pangan Menjadi Evaluasi Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf

“Pemerintah tidak paham atas kepentingan dasar negara sehingga saat menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah hanya peduli atas packagingnya saja, tetapi isi dalamnya tidak ada. Ini merupakan kepanikan pemerintah yang ditransfer kepada perwakilan rakyat”

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (23/10) – Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai bahwa selama setahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, pemerintah tidak perhatian atas permasalahan pangan di masa pandemi.

Menurut Johan, pemerintah tidak paham atas dasar kepentingan negara dan justru gagal fokus, panik, dan semakin menciptakan keadaan yang rumit.

“Pemerintah tidak paham atas kepentingan dasar negara sehingga saat menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah hanya peduli atas packagingnya saja, tetapi isi dalamnya tidak ada. Ini

merupakan kepanikan pemerintah yang ditransfer kepada perwakilan rakyat” jelas Johan saat menjadi narasumber di PKS Legislative Corner, Jum'at (23/10).

Kemudian, Johan menjelaskan ketahanan pangan di Indonesia selama pemerintahan Jokowi belum optimal, bahkan tidak ada perhatian sama sekali sejak dilantikannya Jokowi sebagai presiden RI.

“Ketahanan pangan di Indonesia masih lemah. Berdasarkan indeks ketahanan pangan, Indonesia ada di peringkat ke-62 dari 113 negara. Padahal kit aini negara

yang agraris, tetapi penanganan yang diberikan pemerintah masih buruk” tutur Johan.

Selain itu, Johan juga menyayangkan tindakan pemerintah yang membentuk kebijakan mengutamakan impor daripada menggunakan produk pangan dari dalam negeri. Ini menyebabkan menurunnya semangat petani dan nelayan dalam memproduksi pangan.

“Kebijakan yang dibentuk pemerintah itu sangat berdampak kepada para petani dan nelayan. Adanya kebijakan mengutamakan impor membuat produk dalam negeri dipandang rendah. Ini membuat para petani dan nelayan tidak semangat dalam memproduksi pangan” terang Johan.

Terakhir, sebagai penutup Johan berharap agar pemerintah mulai fokus terhadap permasalahan pangan nasional. Apabila permasalahan ini teratasi, tentunya kesejahteraan masyarakat akan semakin mudah dicapai.



1 TAHUN JOKOWI DALAM ANGKA

Satu tahun terakhir pertumbuhan ekonomi
mengalami trend pemburukan:

Triwulan IV 2019 menurun menjadi 4,97%,

Triwulan I 2020 merosot 2,97%,

Triwulan II 2020 minus 5,32%, dan

Triwulan III 2020 diproyeksikan minus 1-3%.



Evaluasi Satu Tahun Kinerja Pemerintah

Politisi PKS: Jokowi Gagal Sejahterakan Petani

Pemerintah mesti sangat serius untuk memikirkan program yang bisa mensejahterakan petani. Perlu dikaji lebih serius terkait program subsidi pasca panen (subsidi harga). Hal ini menjadi penting, untuk mengurai persoalan pasca panen. Kerap kali terjadi, ketika setiap petani panen, harga selalu jatuh. Ini mesti ditanggulangi

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (22/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Slamet mengatakan, bahwa pengukuran kesejahteraan Petani dapat terlihat jelas pada Nilai Tukar Petani atau yang kerap disebut NTP.

Slamet membandingkan NTP pada setahun sebelum dilantikannya Jokowi sebagai presiden periode II dengan setahun setelah dilantikannya menjadi presiden periode II, terjadi penurunan yang sangat signifikan.

Politisi PKS ini menilai,

bahwa dengan turunnya NTP secara signifikan dari sejak bulan februari hingga september 2020 adalah bukti nyata kualitas hidup petani telah menurun.

Dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, lanjutnya, penurunan NTP terjadi secara terus menerus yang berarti kesejahteraan petani juga turun secara konstan selama tujuh bulan terakhir.

"Penurunan nilai tukar petani yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi gagal

menyejahterakan petani Indonesia. Sangat disayangkan, padahal petani negeri ini merupakan tulang punggung negara ini pada persoalan pangan dan ekonomi kerakyatan", kritis Slamet.

Legislator asal Sukabumi ini menerangkan bahwa NTP adalah sebuah konsep untuk mengukur tingkat kemampuan tukar atas barang (hasil petani) terhadap barang (dan jasa) yang di butuhkan petani untuk proses produksi dan konsumsi bagi petani tersebut. Evaluasi keberpihakan pemerintah kepada petani mesti diperbaharui sehingga ada upaya signifikan pada upaya peningkatan NTP ini. Kenaikan NTP menjadi bukti kinerja pemerintah yang bekerja untuk rakyatnya yang banyak sekali dari kalangan petani. Tapi bila kenaikan NTP tidak segera kunjung di realisasikan, maka akan terlihat pemerintah bekerjanya tidak tepat sasarnya.

Slamet menambahkan, bahwa selama 1 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi telah menampakkan gambaran



bahwa tingkat produktivitas petani yang masih rendah. Hingga saat ini, tidak ada integrasi program pemerintah dari hulu sampai hilir dalam bidang pertanian. Dan fakta yang hingga saat ini masih terjadi adalah impor hasil pertanian yang semakin merajalela yang berdampak pada mundurnya pertanian Indonesia.

"Pemerintah mesti sangat serius untuk memikirkan program yang bisa mensejahterakan petani. Perlu dikaji lebih serius terkait program subsidi pasca panen (subsidi harga). Hal ini menjadi penting, untuk mengurai persoalan pasca panen. Kerap kali terjadi, ketika setiap petani panen, harga selalu jatuh. Ini

mesti ditanggulangi", ujar Ketua Kelompok Komisi IV FPKS ini.

Slamet juga mendorong kepada pemerintah, pada kelanjutan kepemimpinan Jokowi mengelola negara ini, mesti ada tekad dari pemerintah untuk membendung kran impor. Impor ini mesti dibatasi sedemikian rupa dalam rangka perlindungan petani Indonesia.

"Bila kondisi NTP dan longgarnya impor produk pertanian peternakan tidak segera di perbaiki, maka sangat mungkin kedepan tidak hanya produk pertanian yang di impor, tetapi petani nya (manusianya/SDMnya) yang akan di impor oleh pemerintah untuk menjadi tenaga kerja asing", Kritis Slamet menutup.

Setahun Pemerintahan Jokowi

Aleg PKS: Rekor Hutang Terbanyak

posisi utang Indonesia per Juli 2020 telah menyentuh Rp5.434,86 triliun dan bunga utang Indonesia telah mencapai Rp338,8 triliun atau setara dengan 17% dari APBN 2020. Ini menjadi hal yang berbahaya, sebab angka ini telah melewati batas aman yang direkomendasikan oleh IMF, yakni sebesar 10

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (21/10) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati memberikan peringatan kepada pemerintah mengenai penetapan utang luar negeri (ULN).

Berdasarkan data, Anis menyebutkan posisi utang Indonesia per Juli 2020 telah menyentuh Rp5.434,86 triliun dan bunga utang Indonesia telah mencapai Rp338,8 triliun atau setara dengan 17% dari APBN 2020.

"Ini menjadi hal yang berbahaya, sebab angka ini

telah melewati batas aman yang direkomendasikan oleh IMF, yakni sebesar 10%" ujar Anis.

Kemudian, Anis menyebutkan bahwa dengan adanya kebijakan utang tersebut, debt service ratio (DSR) Indonesia pun turut meningkat. Data Statistik Utang Luar Negeri (SULNI) semester I 2020 menunjukkan, DSR tier-1 Indonesia telah mencapai 29,5%, yang mana telah melewati batas aman DSR yang sudah ditetapkan oleh IMF sebesar 25%.

"Dengan DSR di atas 25% itu, artinya jumlah utang Indonesia kini sudah masuk pada tingkat waspada," ungkap Anis.

Anis menilai, utang yang dilakukan pemerintah dalam upaya meredam dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pun masih belum menunjukkan hasil yang maksimal.

"Serapan dana pemulihan ekonomi nasional untuk menangani Covid-19 masih di bawah 40%. Hingga 17 September lalu, dana yang teralokasi baru Rp254,4 triliun, atau 36,6% dari pagu Rp605,2 triliun" jelas Anis.

Oleh karena itu, Anis memberi saran agar pemerintah segera melakukan optimalisasi pembiayaan ULN dan mencari alternatif pembiayaan yang lebih murah. Sementara, utang harus digunakan untuk belanja yang benar benar produktif dan bisa menggerakkan ekonomi rakyat di saat pandemi masih berlangsung.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mari Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Rencana Permen Kominfo Blokir Medsos

Aleg PKS: Bisa Mengancam Kebebasan Berekspresi

“Selama ini peran komunikasi tidak serius dilakukan. Peran yang selama ini dilakukan lebih banyak pada sisi informatika. Padahal peran komunikasi sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah kepada rakyat. Masyarakat selama ini dibingungkan dengan pernyataan para pejabat pemerintah yang tidak konsisten

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (21/10) — Rencana Kominfo mengeluarkan peraturan menteri (Permen) untuk memblokir media sosial di tengah maraknya unjuk rasa mahasiswa dan buruh, menurut Anggota Komisi I DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Sukamta, bisa dipersepsi publik sebagai upaya pembungkaman kebebasan berekspresi masyarakat.

“Saya kira akan muncul dugaan rencana Menkominfo keluaran Permen pemblokiran media sosial ini merupakan reaksi atas banyaknya suara

kritis masyarakat terhadap pemerintah yang alami masalah dalam komunikasi soal pandemi Covid-19 juga atas beragam opini publik terkait pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” ungkap Sukamta.

Pemerintah, lanjutnya, punya kuasa untuk menyatakan yang hoaks dan bukan, seperti pernyataan Menkominfo beberapa waktu lalu.

“Tentu ini akan menimbulkan kekhawatiran jika nantinya kebijakan pemblokiran ini dilakukan dengan pertimbangan yang subjektif

akan membahayakan kebebasan berekspresi,” tegas Anggota Badan Anggaran FPKS ini.

Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini memandang rencana penerbitan Permen tidak akan efektif berjalan, jika tidak dibarengi edukasi secara masif ke masyarakat.

“Saya sepakat dilakukan pemblokiran terhadap media sosial yang menyebarkan fitnah, hoaks, pornografi, tindakan kekerasan, penipuan dan hal-hal lain yang melanggar hukum,” ujarnya.

Namun, imbuh Sukamta, yang tidak kalah penting untuk dilakukan saat ini adalah edukasi secara masif kepada masyarakat bagaimana berperilaku positif di media sosial.

“Pendekatan Pemerintah saat ini terlihat ramai di penegakan hukum. Penegakan hukum ini hanya bagian hilir, ini pun kadang terkesan tebang pilih. UU ITE lebih dikenal sebagai UU untuk memidana masyarakat dan tokoh yang kritis dan berseberangan dengan pemerintah,” pungkask Anggota.

Lebih lanjut Sukamta



mengingatkan ada satu tugas kominfo yang selama ini seakan dilupakan.

“Selama ini peran komunikasi tidak serius dilakukan. Peran yang selama ini dilakukan lebih banyak pada sisi informatika. Padahal peran komunikasi sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah kepada rakyat. Masyarakat selama ini dibingungkan dengan pernyataan para pejabat

pemerintah yang tidak konsisten,” papar Sukamta.

Padaahal, katanya, ini berpotensi memunculkan respon yang bersifat spekulasi di media sosial, yang kemudian distigma oleh pemerintah sebagai hoaks.

“Kalau Pemerintah perbaiki komunikasinya ke masyarakat, saya yakin akan menekan banyaknya hoaks yang muncul,” pungkask Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini.

Terkait Kunjungan Menhan RI ke Amerika

Aleg PKS Minta Pemerintah Berhati-hati

“Saya teringat ungkapan tokoh Iran yang menggambarkan kebijakan Amerika yang berbunyi ‘Jika baik kenapa kami tidak boleh memiliki, akan tetapi jika buruk mengapa mereka memilikinya?’. Ungkapan sederhana penuh makna ini, berangkat dari pengalaman Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan non militer”

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (20/10) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menanggapi kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) RI ke Amerika Serikat.

Toriq menyatakan pemerintahan Trump sedang mempertontonkan politik standar ganda atau double standard negara-negara Barat kepada negara-negara berkembang macam Indonesia.

“Saya berharap agar Indonesia berhati-hati terhadap kebijakan Negara Paman Sam ini”, ungkap Toriq.

“Saya teringat ungkapan tokoh Iran yang menggambarkan kebijakan Amerika yang berbunyi ‘Jika baik kenapa kami tidak boleh

memiliki, akan tetapi jika buruk mengapa mereka memilikinya?’. Ungkapan sederhana penuh makna ini, berangkat dari pengalaman Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan non militer”, jelas Toriq.

Menurut Politikus PKS ini kunjungan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI ke Amerika diperkirakan untuk membeli Alutsista yang diproduksi negara itu.

merika diperkirakan mengetahui Menhan RI membuka peluang pembelian Alutsista ke seluruh negara-negara yang memiliki industri pertahanan yang kuat, termasuk Rusia.

Belum lama ini Amerika memperbaharui peringatannya ke Jakarta untuk tidak membeli Alutsista dari Moscow, Rusia. Ditandai dengan utusan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat James H Anderson menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Jakarta beberapa waktu lalu”, ungkapnya.

Toriq memperkirakan, jabatan Prabowo saat ini sebagai Menteri Pertahanan RI buat negara Paman Sam sangat strategis.

Menhan RI, katanya, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan mulai urusan militer hingga non militer. Sehingga Kondisi ini membuat pemerintahan Trump mau menjilat air liurnya sendiri dengan melanggar Undang-undang yang dibuatnya.

“Padahal sebelumnya Prabowo pada tahun 2012 kepada Reuters mengatakan Amerika telah menolak untuk menerbitkan visa untuknya karena dia diduga terlibat dalam kerusuhan 98 dan melakukan pelanggaran Ham saat Soeharto dipaksa mundur sebagai presiden tahun 1998”, tutupnya.



Jika Benar Ada Menteri hanya Duduk Manis, Aleg PKS: Dosanya Besar Sekali

Jika benar ada menteri yang cuma duduk manis selama pandemi, dosanya besar sekali karena anggaran rakyat digunakan untuk pos yang tidak bermanfaat.

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (25/10) — Elite PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut ada menteri yang kerjanya hanya duduk manis. PKS angkat bicara terkait hal itu.

"Jika benar ada menteri yang cuma duduk manis selama pandemi, dosanya besar sekali karena anggaran rakyat digunakan untuk pos yang tidak bermanfaat," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada detikcom, Jumat (23/10/2020).

Mardani tak mau mengira-nira siapa menteri yang dimaksud Andreas. Namun ia lebih menyoroti Presiden Joko Widodo.

"Menteri mana, Pak Andreas yang lebih tahu. Kalau

saya menyoroti menteri itu punya bos, Presiden RI. Kalau ada menteri yang kerjanya duduk, salah Presiden. Karena semua menteri adalah anak buah presiden. Diangkat dan direshuffle atau diberhentikan oleh presiden," kata Mardani.

Sebelumnya, Andreas menilai ada menteri yang tidak bekerja dengan maksimal. Andreas menyebut ada menteri yang hanya duduk manis, juga ada yang memang kurang paham terhadap apa yang seharusnya dikerjakan.

"Sementara yang seharusnya 'pasang badan' menghadapi publik, ada yang duduk manis, ada yang sibuk

dengan agendanya sendiri, ada juga yang mungkin kagok kurang paham masalah. Jadi akhirnya tidak banyak berbuat, sekadar business as usual," tegasnya.

Padahal, kata Andreas, Presiden Jokowi punya standar terhadap para menterinya untuk bisa paham dan bekerja extraordinary. Hal tersebut kerap disampaikan oleh Jokowi.

"Sementara Presiden punya standar para menterinya untuk paham situasi extraordinary dan bekerja extraordinary di bidang tugasnya masing-masing. Tampaknya situasi seperti ini yang mungkin sedang terjadi," ucap Andreas.



Habib Aboe Apresiasi Kapolri Hukum Berat Oknum Polisi terlibat Narkoba

Saya berharap instruksi Kapolri soal ketegasan terhadap oknum yang terlibat narkoba ini dipahami dengan baik oleh seluruh jajarannya. Alangkah lebih baik jika hal itu dibuat tertulis sehingga akan bisa dipedomani oleh setiap personel anggota kepolisian

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (25/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy merespon sikap tegas Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis terkait instruksinya kepada oknum anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana narkoba dengan hukuman mati.

"Saya mengapresiasi instruksi dari Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis agar penyidik menjerat oknum anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana narkoba dengan hukuman mati," tegas pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan apa yang disampaikan Kapolri adalah bagian dari komitmennya memberantas seluruh peredaran narkotika di Indonesia.

"Ini adalah komitmen yang penting, apalagi menyangkut peredaran narkoba ditengah penegak hukum," ujarnya.

Habib Aboe mengungkapkan seorang pasti akan mengucap sumpah saat akan menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Dalam sumpahnya tersebut berjanji

akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjunjung tinggi hukum.

"Oleh karenanya jika ada oknum yang terlibat dalam peredaran narkoba artinya mereka telah melanggar sumpahnya," pungkas Habib Aboe.

Disisi lain, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan bahwa anggota Polri adalah penegak hukum yang seharusnya memberantas narkoba.

"Sehingga bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya narkoba. Mereka seharusnya memagari agar wilayah NKRI ini bebas dari narkoba," terangnya.

Karenanya, imbuhan Habib Aboe, jika ada oknum yang bermain dalam peredaran narkoba, mereka sebenarnya adalah pagar makan tanaman. Oknum seperti ini mengkhinai kepercayaan yang telah diberikan oleh bangsa dan negara.

"Saya berharap instruksi Kapolri soal ketegasan terhadap oknum yang terlibat



narkoba ini dipahami dengan baik oleh seluruh jajarannya. Alangkah lebih baik jika hal itu dibuat tertulis sehingga akan bisa dipedomani oleh setiap personel anggota kepolisian. Atas langkan ini kami berikan dukungan sepenuhnya. Ini

adalah semangat pemberantasan narkoba yang harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, karena akan menyangkut masa depan anak bangsa," tutup Ketua Majelis Kehormatan Dewan DPR RI ini.

Prabowo Pidato soal Pangan

Aleg PKS: Politis dan Penuh Retorika

Karena menurut saya harusnya pemerintah memberikan solusi untuk mengatasi masalah pangan khususnya alih fungsi lahan. Bukan mengeluh karena rakyat melalui DPR sudah memberikan kewenangan eksekusi kepada pemerintah melalui anggaran, aturan dalam Undang-Undang dan SDM

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (25/10) — Menteri Pertanian Prabowo Subianto menyortir mengenai alih fungsi lahan dari pertanian menjadi infrastruktur.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyebut pernyataan Prabowo politis dan penuh retorika.

"Saya kira itu pernyataan politis dan penuh retorika," kata Andi kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Menurutnya Pemerintah harusnya memberikan solusi untuk mengatasi masalah pangan. Terutama soal alih fungsi lahan.

"Karena menurut saya harusnya pemerintah memberikan solusi untuk mengatasi masalah pangan

khususnya alih fungsi lahan. Bukan mengeluh karena rakyat melalui DPR sudah memberikan kewenangan eksekusi kepada pemerintah melalui anggaran, aturan dalam Undang-Undang dan SDM," imbuhnya.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-57 Fakultas Kehutanan UGM seperti disiarkan daring, Jumat (23/10/2020). Prabowo menyortir masifnya alih fungsi lahan ini diawali dari kekhawatirannya soal sumber daya Indonesia yang diincar oleh bangsa lain. Prabowo mengatakan jumlah pertumbuhan penduduk di dunia makin meningkat, tetapi di sisi lain lahan pertanian

semakin berkurang.

"Bukankah kolonialis bangsa Eropa dahulu masuk ke Indonesia pada awalnya untuk mencari komoditas pangan yaitu rempah-rempah, dan bukankah mereka memandang kepulauan kita sebagai sumber kekayaan yang harus diperas habis. Kekhawatiran bahwa itu akan terulang semakin beralasan kalau kita mencermati perkembangan dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional," ujar Prabowo dalam Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-57 Fakultas Kehutanan UGM seperti disiarkan daring, Jumat (23/10/2020).

"Misalnya jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat, sementara lahan pertanian malah menyusut karena masifnya alih fungsi lahan, begitu banyak lahan untuk pertanian berolah menjadi real estate. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa makan semen? apakah kita bisa makan beton? Untuk apa menara-menara apartemen real estate yang hebat-hebat kalau rakyat tidak bisa makan," sambung Prabowo.



Petani Keluhkan Harga Pupuk

Slamet Minta Pemerintah Kaji Program Subsidi Pasca Panen

“Saat ini banyak petani yang mengeluhkan kelangkaan pupuk dan berimbas kepada aktivitas produksi mereka. Selain itu kita juga mendorong pemerintah agar bisa melakukan aktivasi Kartu Tani untuk akses pupuk bersubsidi.”

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (25/10) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Slamet, meminta pemerintah mengkaji program subsidi pasca panen bagi para petani.

Pasalnya menurut Slamet, saat ini banyak petani yang mengeluhkan kelangkaan pupuk dan berimbas kepada aktivitas produksi mereka.

“Selain itu kita juga mendorong pemerintah agar bisa melakukan aktivasi Kartu Tani untuk akses pupuk

bersubsidi,” kata Slamet saat menggelar reses di wilayah Lengkong Kabupaten Sukabumi, Jumat (23/10/2020).

Slamet menuturkan, dalam masa Pandemi Covid-19 ini hanya sektor pertanian yang paling diperlukan kehadirannya oleh masyarakat. Slamet menilai, petani merupakan kelompok profesi terbesar di Indonesia.

Persoalan pangan itu dalam kondisi apapun pasti

akan dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.

Di sisi lain, sambung Slamet, sektor pertanian juga menjadi penyumbang terbesar untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibanding sektor lainnya.

“Maka pemerintah harus serius memperhatikan nasib para petani kita,” jelasnya.





SUKSESKAN سابقہ قراوٹات سے تمہارے
LOMBA BACA
KITAB KUNING IV
TINGKAT NASIONAL 2020



Persembahkan **Fraksi PKS DPR RI** Dalam Rangka
Peringatan Hari Santri Nasional 2020



**SELAMAT
HARI SANTRI**

Santri Sehat Indonesia Kuat
22 Oktober 2020

Bersama Santri
Berkhidmat
Membangun Negeri

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Anggota Komisi V Minta Pemprov DKI Segera Tuntaskan Permasalahan Tiang Monorail

Perlu adanya kajian dan ketentuan peraturan dari Pemprov DKI dengan PT. Adhi Karya agar tiang-tiang tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya sehingga tidak terlalu membuat kerugian lebih besar bagi PT. Adhi Karya. Seperti pada Asian Games 2018 yang lalu, tiang-tiang monorel menjadi display promosi Asian Games. Namun tidak diketahui, ke mana uang pemasukan iklan-iklan tersebut

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (23/10) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, meminta Pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan tiang monorel yang dibangun di sejumlah titik di Ibukota Jakarta

Suryadi menjelaskan bahwa sejarah monorel di Jakarta dimulai pada tahun 2004, ketika itu terjadi kesepakatan kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. ITC, dimana pihak investor dan sekaligus pengembang (PT. ITC dan Hitachi) bertugas untuk

membangun dan menyediakan sarana monorel, kemudian mengelola operasional monorel selama 30 tahun.

"Setelah itu asetnya akan diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Tetapi pada tahun 2004 itu juga, proyek kemudian berpindah tangan ke konsorsium PT Jakarta Monorel (JM) dan Omnico Singapura. Namun hingga tahun 2005, PT Omnico gagal menyertor modal monorel dan membuat proyek itu terhenti sehingga tiang pancang yang sudah terbangun

menjadi terbengkalai hingga saat ini," terang pria yang akrab disapa SJP ini.

Pada masa jabatan Fauzi Bowo, lanjut SJP, proyek monorel akhirnya dihentikan karena tidak kunjung membuahkan hasil. Tetapi dengan pemberhentian proyek ini, PT JM kemudian menuntut ganti rugi investasi kepada Pemprov DKI sebesar Rp 600 miliar.

"Agar tidak berlarut-larut Pemprov DKI meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit dan memberikan rekomendasi untuk memberikan ganti rugi proyek kepada PT JM maksimal Rp 204 miliar. Sayangnya, PT JM menolak angka yang ditawarkan oleh BPKP, sehingga nasib monorel tertakut-katung hingga kini," urai Anggota DPR asal NTB ini.

Di sisi lain, tambahnya, Ortus Holding selaku pemegang saham mayoritas PT JM dan PT Adhi Karya masih terlibat dalam sengketa harga ganti rugi tiang pancang tersebut. PT Adhi Karya meminta Ortus melunasi pembayaran tiang senilai Rp 193 miliar. Padahal Ortus hanya bersedia membayar ganti rugi



tiang sebesar Rp 130 miliar.

"Sesuai keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 2012, status kepemilikan tiang-tiang monorel itu menjadi hak PT Adhi Karya. Akibat adanya proyek LRT yang melewati Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, PT Adhi Karya berencana membongkar dengan biaya sendiri beberapa tiang monorel yang mangkrak tersebut, namun kenyataannya tiang-tiang monorel masih berdiri di jalan tersebut dan di Jl. Asia Afrika kawasan

Senayan," ungkap Anggota DPR yang bermitra dengan KemenPUPR ini.

Melihat kronologi pembangunan LRT tersebut, imbuhnya, maka sebaiknya tiang monorel yang masih tersisa segera dicabut oleh pemiliknya, yaitu PT. Adhi Karya, karena tiang yang mangkrak tersebut menjadi pemandangan yang tidak sedap di Ibukota.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Masyarakat Miskin Bertambah

Nevi Minta Pemerintah Lebih Fokus pada UMKM

Para pelaku UMKM ini masyarakatnya rata-rata disiplin dalam menjalankan usahanya. Ketika mereka mendapat bantuan, akan memberikan usaha dan upaya terbaik untuk meningkatkan usahanya. Istilahnya, mereka itu amanah. Jadi konsentrasi untuk mengembalikan keadaan kesehatan ekonomi usaha mereka mesti digencarkan

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (19/10) — Pertambahan Rakyat Miskin di Asia Tenggara mencapai jutaan orang akibat Pandemi COvid-19. Di Indonesia merujuk data Bappenas, pertambahan rakyat miskin mencapai 4 juta orang sehingga total rakyat miskin Indonesia mencapai 28,7 juta orang yang sebelumnya sekitar 24,79 juta orang.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuirina meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian rakyat untuk memperkuat sektor UMKM dengan realisasi bantuan yang

sudah direncanakan.

Nevi mengatakan, UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Padahal, lanjutnya, sektor ini merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.

"Para pelaku UMKM ini masyarakatnya rata-rata disiplin dalam menjalankan usahanya. Ketika mereka mendapat bantuan, akan memberikan

usaha dan upaya terbaik untuk meningkatkan usahanya. Istilahnya, mereka itu amanah. Jadi konsentrasi untuk mengembalikan keadaan kesehatan ekonomi usaha mereka mesti digencarkan", tutur Nevi.

Nevi menjelaskan, Sejak program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) digulirkan pada pertengahan 2017 hingga 27 Mei 2020, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan kredit Ultra Mikro (UMi) senilai Rp 6,55 triliun bagi 2 juta lebih pelaku usaha mikro di seluruh provinsi melalui 3 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan 44 Koperasi/linkage.

Nevi melanjutkan, Meskipun pandemi Covid-19 telah berdampak kepada debitur UMi, beberapa debitur mengalami kesulitan sehingga berpengaruh kepada kualitas pembayaran kredit UMi, akan tetapi kondisi ini tak sampai memunculkan fenomena lonjakan non performing loan (NPL).

Catatatan PIP, imbuhnya, tidak ada kredit macet atau



bermasalah dalam pelaksanaan program tersebut. Ini menunjukkan betapa para pelaku UMKM ini disiplin dalam persoalan keuangan.

"Saya sangat menekankan, agar pemerintah memberikan perhatian yang khusus terhadap UMKM. Sampai dengan awal Juni 2020 ada sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku usaha UMKM terdampak pandemi Covid-19. Jumlah ini cukup besar dan bila mampu di tanggulangi, akan memberikan kontribusi perekonomian nasional", ujar Politisi PKS ini.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menerangkan, sebagai forum UMKM se-Sumatera Barat, pihaknya selalu mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah terutama di Sumbar untuk sinergi memberikan kontribusi kepada masyarakat pelaku UMKM.

Upaya ini dilakukan, karena Nevi meyakini bahwa ekonomi kerakyatan ini yang secara perlahan tapi pasti akan mampu mengurangi angka kemiskinan nasional.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Pembahasan RUU Energi Baru Terbarukan Belum Menyentuh Hal Pokok

“Dapat dikonklusikan dalam RUU EBT ini terdapat pasal-pasal yang diselundupkan yang telah mencederai ketentuan dalam UU 10/1997 sebagai UU induk nuklir dan yang pasti akan membuat mundur sektor nuklir nasional. Kami berharap BATAN dan Bapeten bisa lebih mengawal dan mendukung terbukanya investasi di bidang ketenaganukliran

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (21/10) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menjelaskan bahwa tidak benar ada pasal selundupan di draf RUU Energi Baru Terbarukan (RUU EBT).

Sebab, menurut Mulyanto, hingga saat ini pembahasan RUU EBT baru tahap drafting oleh Badan Keahlian DPR RI.

“Artinya, pembahasan RUU EBT masih akan melewati beberapa tahap lanjutan seperti

drafting oleh Komisi VII, drafting oleh Pemerintah, dengar pendapat dengan beberapa pihak, pembahasan Bersama DPR dan Pemerintah, baru kemudian diputuskan,” paparnya.

Mulyanto menjelaskan untuk sampai ke tahap putusan, setiap RUU akan dikaji secara mendalam oleh pihak terkait. Sehingga kalau ada pihak tertentu ingin memasukkan pasal selundupan di RUU EBT pada

tahap ini tentu tidak efektif.

Sebelumnya perusahaan nuklir ThorCon International Pte Ltd mengkritik draf RUU EBT yang sedang dibahas DPR. Perusahaan nuklir asal Amerika itu menuding ada pasal selundupan yang merugikan investor Indonesia di bidang ketenaganukliran.

Kepala Perwakilan ThorCon International Pte Ltd di Indonesia, Bob S. Efendi menyebutkan dalam RUU EBT banyak ketentuan yang tumpang tindih dengan ketentuan dalam UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran.

“Dapat dikonklusikan dalam RUU EBT ini terdapat pasal-pasal yang diselundupkan yang telah mencederai ketentuan dalam UU 10/1997 sebagai UU induk nuklir dan yang pasti akan membuat mundur sektor nuklir nasional. Kami berharap BATAN dan Bapeten bisa lebih mengawal dan mendukung terbukanya investasi di bidang ketenaganukliran,” ujar Bob S. Efendi kepada media.



Menanggapi hal tersebut Mulyanto menjelaskan dugaan itu tidak benar. Sebab saat ini pembahasan RUU EBT baru tahap penyusunan draf oleh Badan Keahlian DPR.

“Mungkin karena ini perusahaan AS, belum paham benar tentang proses perundangan di Indonesia. Penggunaan kata ‘penyeludupan’ tidak tepat dalam konteks pembentukan RUU EBT pada tahap yang masih dini ini,” urainya.

RUU inisiatif DPR ini, kata Mulyanto, sekarang baru tahap drafting dari Badan Keahlian DPR, bukan draf dari Komisi VII, bukan pula draf dari DPR RI, apalagi sebagai draf yang sudah disahkan bersama Pemerintah.

“Bahkan sekarang ini

masih pada tahap menjarung masukan dari berbagai pihak terkait untuk menyempurnakan draf yang ada. DIM dari fraksi-fraksi saja belum diminta. Jadi masih dalam tahap yang awal sekali. Akan terus berubah bersama proses dan tahapan pembahasan yang ada,” urainya.

“Biasanya istilah penyeludupan pasal itu digunakan ketika ada pasal yang tiba-tiba masuk dalam dokumen/draf RUU yang sudah disahkan, padahal substansinya tidak pernah dibahas dalam panja. Pasal atau ayat itu tiba-tiba muncul secara selundupan,” jelas Mulyanto.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA
DIWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Selamat Hari Dokter Nasional

24 oktober 2020

“ Muliakan profesi,
tetap berkontribusi untuk negeri,
bersama hadapi pandemi untuk
Indonesia yang sehat dan kuat ”

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Vaksinasi Dipercepat November

Politisi PKS Minta Seluruh Prosesnya Transparan

Semua prosesnya harus transparan. Kalau dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase 3 di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authorization) maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (21/10) — Pemerintah melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menjanjikan Vaksinasi massal akan dimulai pada November 2020. Vaksin yang dipesan adalah produksi Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics dari China itu akan disuntikkan kepada berbagai lapisan masyarakat dengan rentan usia 18-59 tahun.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher meminta proses pengadaan vaksin Covid-19 harus transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

"Semua prosesnya harus transparan. Kalau dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase 3

di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authorization) maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat. Karena saat ini di masyarakat isunya menjadi liar aman atau tidaknya vaksin ini? Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk," kata Netty dalam keterangan mediana, Rabu (21 Oktober 2020).

Selain itu menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, pemerintah juga harus transparan terkait penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin Covid-19.

"Penggunaan anggaran

untuk pengadaan vaksin juga harus transparan mengingat ini adalah anggaran sekaligus amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel. Berapa harga vaksinnya, berapa yang harus dibayar masyarakat dan kelompok masyarakat mana yang digratiskan ini harus jelas. Pemerintah berkewajiban untuk melaporkan secara reguler dan detil. Dan sepantasnya pengadaan vaksin ini semata-mata untuk melindungi rakyat dari pandemi Covid-19 dan bukan untuk dijadikan proyek oleh orang-orang yang punya kepentingan" tambah Netty.

Terakhir Netty mengingatkan agar pemerintah terus menjaga dan mengetatkan protokol kesehatan meskipun dilakukan vaksinasi secara massal.

"Harus ada edukasi yang turun langsung ke masyarakat bahwa vaksinasi tidak berarti bebas Covid-19, pemerintah harus mampu mengantisipasi euforia masyarakat. Penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat, jangan sampai gara-gara euforia vaksin ini kebiasaan 3M dan 3T menjadi ambayr" tandas Netty.



Kritisi Kinerja Ekonomi Pemerintah

Anis: Pemerintah Harus Pikirkan Kebijakan Tambahan UMKM

“Perlu menjadi catatan bahwa total UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 59 juta. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan hingga April 2020 tercatat terdapat sebanyak 10jt UMKM yang dikategorikan berpotensi menerima restrukturisasi. Jumlah ini hanya sebesar 16,9% dari total UMKM

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (23/10) — Kinerja penanganan ekonomi Pemerintah pada saat pandemi covid-19, mendapatkan banyak sorotan masyarakat luas seiring dengan genap setahun usia pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Terkait dengan hal tersebut, Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, juga menyampaikan pandangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Dokter ekonomi Islam dari Universitas Airlangga ini menjelaskan bahwa program-program stimulus penanganan

ekonomi saat pandemi covid-19 terangkum dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

“Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional ini hanya 38,6% atau setara dengan 258,3 Trilyun dari PAGU yang dianggarkan 695,2 Trilyun,” katanya.

Adapun rincian realisasinya yaitu : bidang kesehatan hanya 21,92 Trilyun atau 25,04% dari total PAGU 87,55 Trilyun. Bidang perlindungan sosial realisasinya

157,03 Trilyun atau 77,1% dari total PAGU 203,91 Trilyun.

Bidang sektoral Kementerian dan lembaga dan PEMDA hanya 25% atau 26,61 Trilyun dari total PAGU 106,05 Trilyun. Bidang UMKM realisasinya adalah 84,85 Trilyun atau 68,7% dari PAGU 123,47 Trilyun. Bidang insentif usaha realisasinya 28,7 Trilyun atau 23,27% dari PAGU 120,61 Trilyun.

Sedangkan untuk realisasi bidang korporasi sampai September 2020 belum terealisasi dari anggaran 53,57 Trilyun.

Anis menegaskan, jika diasumsikan pertumbuhan realisasi mencapai 20% per bulan hingga akhir tahun, maka realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional ini hanya mencapai 50-60%. Artinya akan ada dana lebih dari 300 Trilyun yang tidak terserap.

“Realisasi yang rendah ini menyebabkan tujuan utama adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional itu belum dapat dinikmati oleh masyarakat,” kata Anis.

Hal itu tercermin dengan adanya pertumbuhan negatif



pada kuartal ke-2 tahun 2020, yaitu mencapai 5,3% negatifnya.

“Dengan angka seperti itu, kuartal ke-3 kita perkirakan masih negatif juga,” ujar Anis.

Menjawab pertanyaan apakah Program Pemulihan Ekonomi Nasional pemerintah sudah cukup optimal membantu pelaku UMKM maupun masyarakat? Politisi senior PKS ini memberikan catatannya.

“Perlu menjadi catatan

bahwa total UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 59 juta. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan hingga April 2020 tercatat terdapat sebanyak 10jt UMKM yang dikategorikan berpotensi menerima restrukturisasi. Jumlah ini hanya sebesar 16,9% dari total UMKM,” papar Anis.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Anggota Baleg: Bahas UU Omnibus Law bagian Pembelaan pada Masyarakat

Kami menyadari kesertaan PKS dalam pembahasan RUU Ciptaker adalah bagian dari menjalankan fungsi penyeimbang tersebut dan kami dapati ternyata persoalan keberpihakan pada masyarakat menjadi catatan besar dalam pembahasan UU Ciptaker

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (20/10) — Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menanggapi hasil penelitian LP3ES, yang menyebutkan bahwa PKS mendapatkan penilaian positif publik selama isu UU Cipta Kerja ini bergulir.

Menurut Ledia, pada setiap pembahasan UU, selalu ada sorotan masyarakat di dalamnya apalagi terhadap UU yang dipandang lebih mempengaruhi hajat hidup orang banyak seperti UU

Ciptaker.

"Bagi PKS sebagai partai yang sejak awal menyatakan sebagai oposisi bagi Pemerintah, akan selalu menjadi penyeimbang agar demokrasi ini berjalan baik. Kami menyadari kesertaan PKS dalam pembahasan RUU Ciptaker adalah bagian dari menjalankan fungsi penyeimbang tersebut dan kami dapati ternyata persoalan keberpihakan pada masyarakat menjadi catatan besar dalam pembahasan UU Ciptaker,"

terang Anggota Panja UU Omnibus Law FPKS ini.

Jikapun reaksi masyarakat positif terhadap substansi penolakan PKS terhadap UU Ciptaker, lanjutnya, pihaknya mengaku bersyukur.

"Namun tidak berhenti sampai disini, masih banyak hal yang harus diperjuangkan secara konsisten dalam pembelaan terhadap kepentingan masyarakat, bangsa dan negara", tutup Ledia.



UU Cipta Kerja Berpotensi Lemahkan Perlindungan bagi Konsumen Produk Halal

“Penyelenggaraan jaminan produk halal sejatinya bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (20/10) — Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta pemerintah tidak abai terhadap aspek perlindungan konsumen produk halal.

Kritik ini disampaikan Bukhori, mengingat UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan berpotensi merugikan konsumen produk halal.

“Pemerintah tidak boleh gegabah dalam menyusun aturan turunan dari UU Cipta Kerja, khususnya perihal jaminan produk halal. Pasalnya, setelah kami melakukan penayitiran terhadap versi 812 halaman, kami menemukan

sejumlah kelemahan substansi dari UU tersebut, khususnya terkait regulasi sanksi bagi pelanggaran terhadap kewajiban registrasi halal,” ungkap Bukhori di Jakarta, Selasa (20/10).

UU Cipta Kerja turut mengubah salah satu ketentuan di UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, tepatnya di pasal 48. Pada mulanya Pasal 48 UU eksisting berbunyi: (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan

barang dari peredaran.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Namun dalam Pasal 48 versi UU Cipta Kerja klausul 'berupa penarikan barang dari peredaran' dihapus sehingga berubah menjadi:

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pencantuman wujud sanksi administratif yang konkrit sedianya dalam rangka menunjukkan ketegasan dan keberpihakan Negara terhadap pengadaan produk impor yang halal. Tetapi, penghapusan wujud sanksi tersebut, sebaliknya akan membuat kebijakan registrasi halal produk impor menjadi lebih



permissif terhadap pelanggaran kewajiban registrasi.

“Penyelenggaraan jaminan produk halal sejatinya bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Dalam upaya mendukung hal tersebut, maka disusun juga regulasi mengenai wujud sanksi yang jelas apabila dalam praktiknya terjadi penyimpangan oleh pelaku usaha,” imbuhnya.

Dengan demikian, sambungnya, keterangan terkait wujud konsekuensi hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan (red, Pasal 48 UU JPH) adalah dalam

rangka, semaksimal mungkin, menutup celah bagi potensi terjadinya pelanggaran kewajiban registrasi.

Selain itu, pencantuman wujud sanksi juga sebagai upaya menyampaikan pesan yang kuat kepada pelaku usaha dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim. Sebab, apabila aspek ini diabaikan, maka perlindungan konsumen Indonesia dalam memperoleh produk impor yang halal menjadi terabaikan.

“Artinya, Negara menjadi tidak berpihak pada konsumen dalam mendapatkan produk halal,” tegasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anggota Baleb FPKS: Dua Industri Strategis Nasional Terancam UU Cipta Kerja

"Ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara, karena ada potensi kekuatan diluar institusi militer negara yang akan sulit dikendalikan Negara, akibat dibebaskannya pemodal di industri pertahanan dan peralatan perang

AMIN AK.M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Surabaya (20/10) — Anggota Badan Legislasi (Baleb) DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak., menyoroti UU Omnibus Law Cipta Kerja (OBL CK) yang berpotensi mengancam kedaulatan negara, khususnya dalam pengelolaan industri strategis nasional. Hasil kajian pada naskah UU OBL CK versi 812 halaman yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 5 oktober 2020 lalu, lanjut Amin, setidaknya ada dua Industri Strategis Nasional yang terancam.

"Pertama adalah Industri Penerbangan. UU OBL CK mengubah pasal 237 pada UU

No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan dimana sebelumnya dinyatakan Perusahaan Bandar Udara dilakukan oleh Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia," ungkapnya.

Di UU OBL CK, imbuhnya, pasal tersebut diubah menjadi Pengembangan Usaha Bandar Udara dilakukan melalui penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

"Frasa yang dihilangkan adalah frasa yang menyatakan bahwa mayoritas saham badan usaha harus dimiliki negara," beber Anggota Komisi VI ini.

Penghilangan frasa tersebut, katanya, berdampak pada berlakunya mekanisme pasar dalam perusahaan bandar udara. Dengan kata lain peran Negara menjadi jauh berkurang, dan terbuka peluang usaha bandar udara dimiliki asing.

"Saat ini saja, ketika bandar udara dikuasai negara lewat BUMN, muncul kasus tentang masuknya pekerja asing secara massif dan berbagai persoalan keimigrasian. Apalagi bila bandar udara dikelola swasta atau bahkan asing," tegas Amin.

"Padahal bandar udara adalah aset strategis nasional yang menjadi pintu masuk bagi orang asing kedalam negeri. Perubahan ketentuan ini sangat berbahaya bagi kedaulatan Negara," jelas Amin.

Industri Pertahanan, tergang Amin, merupakan



Industri strategis Nasional berikutnya yang terancam adalah Industri Pertahanan.

"UU OBL CK mengubah dua Undang-undang strategis terkait Pemodal dalam Industri Pertahanan dan Keamanan Nasional, yaitu UU No.16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal," ujarnya.

Di UU Industri Pertahanan, kata Amin, ketentuan tentang kepemilikan modal atas industri alat utama yang seluruhnya milik Negara, dan industri alat penunjang serta komponen

pendukung yang merupakan milik BUMN dengan saham mayoritas dimiliki Negara, diubah oleh UU Cipta Kerja, dengan memperbolehkan perusahaan swasta memiliki industri alat utama pertahanan Negara.

"Swasta disini bisa lokal dan asing, tidak ada ketentuan yang membatasi kepemilikan asing di UU ini baik pada komponen alat utama, penunjang dan pendukung," pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Mulyanto Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja

“Publik berhak tahu terkait hal ini agar memperoleh kepastian, bahwa memang benar dokumen resmi 812 halaman yang berifat final tersebut sudah sesuai dengan hasil akhir Panja Cipta Kerja. Tidak ada penambahan maupun pengurangan pasal atau ayat dalam dokumen final tersebut

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (19/10) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, meminta DPR dan Pemerintah tidak gonta-ganti dokumen RUU Cipta Kerja.

Mulyanto menegaskan, berdasarkan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib pasal 163 huruf c dan huruf e diatur ketentuan, bahwa pada saat pengambilan keputusan Tingkat I, dilakukan pembacaan serta penandatanganan naskah RUU.

“Begitu yang saya pahami, sehingga tidak diperbolehkan

adanya perubahan redaksional apalagi substansial terhadap RUU yang sudah disahkan melalui pembacaan dan penandatanganan naskah RUU tersebut” tutur Mulyanto.

Bukan hanya gonta-ganti dokumen, Mulyanto juga menjelaskan sejak disahkan sampai dengan penyerahan dokumen resmi kepada Presiden di tingkat DPR, terjadi koreksi di tingkat Pemerintahan berdasarkan recall tanggal 16 Oktober 2020.

“Publik berhak tahu terkait

hal ini agar memperoleh kepastian, bahwa memang benar dokumen resmi 812 halaman yang berifat final tersebut sudah sesuai dengan hasil akhir Panja Cipta Kerja. Tidak ada penambahan maupun pengurangan pasal atau ayat dalam dokumen final tersebut” ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, apabila terjadi penambahan ataupun pengurangan pasal atau ayat dalam UU Cipta Kerja, maka telah terjadi pelecehan terhadap lembaga legislatif



REKAPITULASI 15 PESERTA BABAK GRAND FINAL

LOMBA PIDATO BIOGRAFI TOKOH BANGSA

Dengan pertimbangan yang matang dan didorongkan keinginan luhur.
Berdasarkan segala aspek, syarat dan ketentuan penilaian.
Maka kami Juri Pidato Biografi Tokoh Bangsa, memutuskan 15 peserta terbaik
yang terseleksi dari 138 peserta yang tersebar dari 23 Provinsi Se Indonesia.



1 Ir. Soekarno

- Yusmadi (Aceh)
- Nur Yuniar Tri Dewinta (Purwakarta, Jawa Barat)
- I Wayan Harleyo Nila P (Denpasar, Bali)

2 Jend. Soedirman

- Aman Nurohman (Indramayu, Jawa Barat)
- Muhammad Ichsan (Bogor, Jawa Barat)
- Sherly Aprilil (Solo, Jawa Tengah)

3 Moh. Hatta

- Rifqi Syakhshi Farobi (DKI Jakarta)
- Zulfa Mahbubbah (DKI Jakarta)
- Nur Rahmawati Nanda N (Temanggung, Jawa Tengah)

4 KH. Hasyim Asy'ari

- Muhammad Azlan Lubis (Tanjung Balai, Sumut)
- Andi Rizal Yusradi (Kolaka, Sulawesi Tenggara)
- Lalu Yulhaidir (Nusa Tenggara Barat)

5 KH. Ahmad Dahlan

- Amni Luthfiani (Garut, Jawa Barat)
- Pia Betris Sarumaha (Kab. Nias Selatan, Sumut)
- Abdul Muis (Pandeglang, Banten)



Dr. H. Zuhri Juwaini, M.A.
Ketua Juri PIDB 2023



H. Ledia Hanika A., S.Si, M.Psyt
Ketua Juri PIDB 2023

Keputusan juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat

Bantu Para Petani

Rofik Salurkan 400 Paket Konverter Kit Petani Sasaran di Kebumen

“Program ini betujuan untuk memberikan solusi penyediaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan sudah dikenal di masyarakat, serta menyelamatkan lingkungan dengan menekan emisi gas karbon monoksida/gas buang

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Kebumen (23/10) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rofik Hananto menyerahkan bantuan 400 Paket konversi BBM ke BBG untuk mesin pompa air bagi petani sasaran di Kabupaten Kebumen.

Penyerahan paket bantuan berupa pompa air, selang, tabung dan isi LPG 3 kg, regulator, dan perangkat konverter lainnya secara simbolis digelar di Gudang Cadangan Pangan Pemkab Kebumen pada Jumat 23 Oktober 2020.

Rofik Hananto mengata-

kan program konversi BBM ke BBG sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

Selain memberikan solusi penyediaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, perawatan mesin dengan bahan bakar elpiji juga cenderung lebih mudah ketimbang mesin dengan BBM. program konversi BBM ke GAS ini juga

memberikan dampak positif untuk pengamatan pengeluaran biaya bahan bakar.

“Program ini betujuan untuk memberikan solusi penyediaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan sudah dikenal di masyarakat, serta menyelamatkan lingkungan dengan menekan emisi gas karbon monoksida/gas buang.” Kata Rofik

Selain itu, program konversi BBM ke GAS ini juga memberikan dampak positif untuk pengamatan pengeluaran biaya bahan bakar. Para petani bisa menghemat sampai dengan 50%.” Tambah Pria yang akrab dipanggil mas Rofik

Rofik meminta agar paket konversi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani dan diharapkan pada tahun berikutnya petani yang dapat menikmati program ini bertambah jumlahnya.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Kebumen Yazid Mahfudz, Kepala Pusat



Pengelola Barang Milik Negara Kementerian ESDM Hufron Arofi dan Sales Branch Manager (SBM) IV Pertamina Tegel Adeka Sangtraga Hitapriya.

Bupati Yazid Mahfudz berterimakasih kepada Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto dan Kementerian ESDM atas pendistribusian paket konversi BBM ke BBG tersebut.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto dan Kementerian ESDM atas pendistribusian paket konversi BBM ke BBG ini. masyarakat Kebumen 58 persen adalah petani, jadi bantuan semacam ini sangat berarti bagi kami,” ungkap Yazid Mahfudz.

Kriteria petani yang berhak mendapatkan paket konverter kit BBM ke BBG sesuai Perpres Nomor 38 Tahun 2019 yaitu petani yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektare, kecuali untuk transmigran yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 hektare.

Kemudian melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa dengan daya paling besar 6,5 HP. Juga belum pernah menerima bantuan yang sejenis dan mesin pompa air yang dimiliki berbahan bakar minyak.

Diharapkan dengan bantuan ini akan meningkatkan kesejahteraan para petani.

Hadiri Peresmian Kafe saat Reses

Nevi Dorong Pemerintah Buktikan Kinerja BKPM bagi UMKM

Saya perlu mengkonfirmasi pernyataan BKPM, yang akan fokus mengelola UMKM dengan baik, terutama di daerah pemilihan saya. Karena upaya memperkuat UMKM ini telah di mulai sejak Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM)"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (19/10) — Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuirina meminta kepada Pemerintah melalui Komisi VI untuk mempercepat realisasi bantuan Pemerintah atau bantuan Presiden kepada UMKM.

Bantuan untuk UMKM ini, menurut Nevi, akan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Nasional untuk tidak Minus. Bahkan akan bertahan pada kisaran 3% hingga 3,5%.

"Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun telah mengakui, bahwa Kunci Ekonomi domestik adalah UMKM. Dan UMKM ini bila sehat secara serentak se-Indonesia, akan menjadi benteng pertahanan negara dalam stabilisasi ekonomi nasional", tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini dalam menjalankan aktivitas di daerah pemilihan-

nya selalu mengupayakan bantuan kepada UMKM baik secara mandiri dari pribadi, juga bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat terus bergeliat kegiatan usahanya.

Nevi mencontohkan, berbagai kegiatan bantuan untuk UMKM berupa Modal kerja, Pelatihan pendampingan pelaku UMKM, bantuan alat hingga pameran pemasaran Produk UMKM.

Anggota DPR ini kerap memborong produk-produk UMKM berbagai sektor dari tekstil hingga makanan. Hasil pembeliananya ia bagi-bagi kepada masyarakat kurang mampu di dapilnya atau untuk pendampingan operasional para relawan di tiap kabupaten kota yang selama ini membantunya.

"Saya perlu mengkonfirmasi pernyataan BKPM, yang akan fokus mengelola UMKM dengan baik, terutama di daerah pemilihan saya. Karena upaya memperkuat UMKM ini



telah di mulai sejak Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM)", jelas Nevi.

Politisi PKS ini, ketika di lapangan masih menemukan tidak lancarnya Bantuan alat, bantuan modal kerja, bantuan modal yang berasal dari Bantuan Presiden. Oleh karena itu ia meminta kepada pemerintah melalui komisinya di DPR agar semakin mempercepat realisasi bantuan ini.

Karena menurutnya, harapan Pemerintah akan

kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional mencapai 60 persen hanya akan sia-sia karena tidak selaras antara harapan dan kinerja di lapangan.

"Saya selalu mendukung upaya Pemerintah untuk memajukan UMKM. Karena selama ini sudah terbukti, pada kasus gejalok ekonomi tahun 1998 di Indonesia, yang menyelamatkan ekonomi Indonesia bukan Korporasi besar. Tapi UMKM lah yang menjadi garda terdepan dalam penyelamatan ekonomi nasional", tutup Nevi Zuirina.

Perangi Riba, Anggota FPKS Kuatkan Program Ibu Berdaya di Dapilnya

"Ada prosesnya, mereka akan dibekali edukasi secara massif. Kita berprinsip, jika masyarakat terhindari dari sesuatu yang haram, maka akan mendatangkan keberkahan

drrh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (19/10) — Maraknya keberadaan praktik pinjaman berbasis riba murni atau bank emok alias bank keliling, menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet.

Apalagi, kata Slamet, mobilisasi bank tersebut cukup berkembang pesat di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, politisi senior PKS ini melakukan terobosan dengan mengulirkan program "Ibu Berdaya".

Program ini, katanya, diklaim mampu menjadi alternatif dalam mengikis keberadaan bank keliling yang menjadi salah satu pemicu permasalahan di masyarakat.

"Program Ibu Berdaya merupakan program peminjaman

tanpa riba dan insyaAllah jauh dari riba," kata Slamet pada kegiatan seminar satu hari tanpa riba di Mahoni Leisure Jalan Gandasoli Kecamatan Sukaraja, belum lama ini.

Slamet menuturkan, untuk melakukan pinjaman melalui program tersebut harus melewati beberapa tahap pembinaan yang sudah ditentukan.

"Anggota atau peserta pinjaman akan diberikan pembekalan dan edukasi, sehingga para peserta akan memahami cara kerja program ini," ungkapnya.

"Ada prosesnya, mereka akan dibekali edukasi secara massif. Kita berprinsip, jika masyarakat terhindari dari sesuatu yang haram, maka akan mendatangkan keberkahan," imbuh Slamet.

la menambahkan, program yang digagasnya ini murni menggunakan dana pribadi hasil urunan bersama keluarganya. Untuk tahap awal, para peserta akan diberikan pinjaman sebesar Rp 500 ribu, kemudian bisa meningkat menjadi Rp 800 ribu dan seterusnya.

"Jika tahap awal bagus, maka akan terus meningkat dana pinjamannya. Dan dana ini bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah modal usaha," tambah Slamet.

Sementara itu, hadir dalam seminar satu hari tanpa riba tokoh wanita Sukabumi, Yani Jatnika Marwan, Direktur Program Ibu Berdaya, dan puluhan peserta dari berbagai daerah.

Dalam kesempatannya, Yani mendukung program yang digulirkan Slamet tersebut. Menurut dia, program Ibu Berdaya menjadi alternatif bagi warga yang terilit pinjaman kepada rentenir.

"Kami mengajak kepada masyarakat terutama kaum ibu untuk menghindari praktik riba, terutama bank emok atau bank keliling," kata Yani.



Masa Reses, Adang Daradjatun Turun di Kali Baru

Selama wabah Corona Virus yang melanda Indonesia April 2020, Adang Daradjatun yang merupakan Anggota dari Partai Keadilan Sejahtera, dibantu struktur PKS dan Relawan Adang Daradjatun (RAD) selalu melaksanakan kunjungan dengan pembagian bantuan paket kebutuhan bahan pangan.

Jakarta (19/10) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan DKI III, Adang Daradjatun melakukan kunjungan pada reses masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021.

Kegiatan reses dilaksanakan pada (17/10/2020) di Jalan Kali Baru Barat 4, RT/RW : 012/07, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Selama wabah Corona Virus yang melanda Indonesia April 2020, Adang Daradjatun yang merupakan Anggota dari Partai Keadilan Sejahtera, dibantu struktur PKS dan Relawan Adang Daradjatun (RAD) selalu melaksanakan kunjungan dengan pembagian bantuan paket kebutuhan bahan pangan.

Acara dihadiri para tokoh yakni Caharudin selaku Ketua RW 07, Hafid yang merupakan

Ketua RT 012, dan para Tokoh Masyarakat.

Selain itu selaku pelaksana, PKS setempat yang dikomandoi Asep Jaelani selaku DPRa PKS Kali Baru juga dihadiri Nurman Kasmuri selaku DPC PKS Cilincing.

Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan penyerahan langsung ke masing-masing rumah warga agar tidak terjadi pengumpulan masa. (19/10/2020)



Reses di Pandeglang

Anggota DPR RI Dimiyati Sampaikan Pentingnya Pendidikan

Saya harap kegiatan reses ini dimanfaatkan oleh dinas pendidikan, karena kegiatan ini fokus kepada pengawas dan koorwil dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan kita punya satu tujuan, satu langkah, satu harapan agar dunia pendidikan semakin maju

DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH

Anggota Komisi III DPR RI

Kabupaten Pandeglang (20/10) — Membangun dunia pendidikan harus didasari pada satu tujuan, satu tekad, satu langkah dan satu harapan demi memajukan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

Hal itu dikatakan Anggota DPR RI daerah pemilihan Banten 1 Pandeglang-Lebak Dimiyati Natakusumah saat melaksanakan agenda reses di wilayah Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Senin 19 Oktober 2020.

Dimiyati mengatakan, kegiatan reses harus dimanfaatkan untuk bersilaturahmi.

"Saya harap kegiatan reses ini dimanfaatkan oleh dinas pendidikan, karena kegiatan ini fokus kepada pengawas dan koorwil dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan kita punya satu tujuan, satu langkah, satu harapan agar dunia pendidikan semakin maju," ujarnya.

Dimiyati menilai secara nasional pendidikan di

Pandeglang sudah bagus. Selain dinas pendidikan memiliki tugas pokok, juga punya tugas teritori dalam mengawasi pendidikan.

"Jadi sampaikan semua keinginan, harapan, keluhan sampaikan dalam reses. Termasuk ketika ingin pencerahan, penyegaran silakan sampaikan," ujarnya.

Dimiyati menilai guru yang terbaik adalah yang dicintai masyarakat dan disukai masyarakat, ini harus dimiliki



oleh kepala sekolah.

"Saya berharap guru, pengawas dan kepala sekolah harus berperan aktif di masyarakat. Jadi yang terhebat itu adalah guru yang harus dekat dengan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, yang perlu dilakukan dalam dunia pendidikan adalah serahkan semuanya kepada tanggung jawab masing-masing kepala sekolah.

"Saya juga berharap kita harus bersama-sama melaksanakan tanggung jawab melawan pandemi Covid-19.

Jadi semuanya harus ikut berpartisipasi dalam dunia pendidikan" ujarnya

Dimiyati juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan Pilkada Pandeglang tahun 2020.

"Jadi partisipasi harus bagus, partisipasi harus 80 persen. Ini tugas semua untuk mendorong partisipasi memilih pada Pilkada di Pandeglang. Saya berpesan dalam menghadapi pesta demokrasi, mari jaga kondusivitas, kemanan dan kenyamanan daerah," ujarnya.

Masa Reses, Saadiah Serahkan Bantuan Ratusan PJU Tenaga Surya di Dapil Maluku

“Harapannya keberadaan fasilitas lampu jalan ini akan mampu menunjang sarana pendukung pariwisata, menerangi sarana prasarana umum dan mengurangi potensi kerawanan sosial”

**SAADIAH
ULUPUTTY, S.T**
Anggota Komisi VII DPR RI

Jalan Umum Tenaga Surya sebanyak 300 unit tersebar di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru, Kota Tual dan Maluku Tenggara. Masing – masing kabupaten/kota mendapatkan alokasi sebanyak 50 unit. Advokasi PJU Tenaga Surya sesuai dengan usulan saat reses”, kata Saadiah dalam kegiatan penyerahan bantuan PJU-TS yang dilakukan pada puncak kegiatan “Met Ef Tahayad” (Meti Kei Tayando) di Kota Tual, (22/10/2020).

Ratusan PJU – TS sebut Saadiah, dimaksud untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan dan pemerataan akses energy.

Selain itu, lanjutnya, ketersediaan PJU – TS mampu untuk mendukung pariwisata dan menerangi sarana – prasarana umum.

“Harapannya keberadaan fasilitas lampu jalan ini akan mampu menunjang sarana pendukung pariwisata, menerangi sarana prasarana umum dan mengurangi potensi kerawanan sosial”, tandas Anggota Fraksi asal Provinsi Maluku ini.

Tual (24/10) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyerahkan bantuan ratusan unit Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya Di Propinsi Maluku.

Sejumlah 300 unit PJU Tenaga Surya yang diadvokasi pihaknya, tersebar di 5 kabupaten sesuai proposal yang diterima saat kunjungan reses.

“Bantuan Penerangan



Saadiah merinci, PJU-TS merupakan salah satu inovasi yang dilakukan dengan mengganti PJU yang mulanya menggunakan energi listrik diganti dengan energi matahari sebagai sumber energi untuk penerangan.

Setiap panel PJU-TS terdiri dari komponen panel surya, baterai, solar charger controller, tiang dan bracket, lampu LED

dan armature, kabel dan aksesoris, serta instalasi dan pondasi.

“Program PJU-TS mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui tenaga surya. Tidak menggunakan pembangkit listrik. Cahaya lampu dihasilkan dari energi matahari”, imbuhnya.

Dengan daerah sasaran yang menjangkau pelosok pedesaan

di Maluku, program PJU-TS ikut mendorong pemenuhan akses listrik terutama penerangan umum bagi masyarakat.

“Pelosok pedesaan banyak yang belum memiliki akses listrik memadai. Dengan pemasangan PJU tenaga surya, pelosok desa dapat merasakan fasilitas penerangan”, kata Saadiah.

Mengawali Masa Reses

Ahmad Syaikhul Berikan Bantuan kepada Satgas Covid-19

"Banyak kader juga simpatisan PKS yang positif Corona. Mereka ini wajib kita perhatikan dengan cara membantu logistik dan lainnya. Mereka yang diisolasi, apalagi jika kepala keluarga akan berdampak pada ekonomi. Disinilah mengapa kita harus peduli

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Kabupaten Bekasi (22/10) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul mengunjungi kantor DPD PKS Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta, Senin (12/10/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Syaikhul memberikan bantuan kepada Tim Satgas Covid-19 yang ada di tiga DPD tersebut.

Menurut Syaikhul, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kader dan simpatisan yang terkena Covid-19 serta dampaknya.

"Banyak kader juga simpatisan PKS yang positif

Bekasi itu juga menyinggung tentang pengaruh pandemi Corona terhadap kehidupan masyarakat. Semua sektor terkena dampaknya. Kini, tak lagi krisis kesehatan yang dihadapi tapi juga ekonomi dan sosial.

Sebab itu, Syaikhul mengajak semua pihak untuk bahu-membahu mengatasi ini.

"Kita harus saling menguatkan, bergandengan tangan dan bahu-membahu. Pandemi ini harus kita hadapi secara bersama-sama," ajak Syaikhul.

Dalam kunjungan ini, Syaikhul juga meminta pimpinan DPD dan kader untuk menjaga integritas dan kedekatan hubungan dengan Allah SWT.

Sebab ini merupakan kunci saat menghadapi situasi krisis sekarang.

"Jaga integritas moral dan sosial kita. Lalu tingkatkan kualitas hubungan kita kepada Allah SWT," tegas Syaikhul.

Corona. Mereka ini wajib kita perhatikan dengan cara membantu logistik dan lainnya," ujar Syaikhul yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI ini.

Kepedulian ini sangat penting, sebab mereka yang positif Corona akan diisolasi. Sehingga berdampak pada keluarganya secara kesehatan dan ekonomi.

"Mereka yang diisolasi, apalagi jika kepala keluarga akan berdampak pada ekonomi. Disinilah mengapa kita harus peduli," kata Anggota DPR asal Kabupaten Bekasi itu.

Mantan Wakil Walikota



Reses di Depok

Aleg PKS Tegaskan Pentingnya Mengokohkan Ketahanan Keluarga

“Selain faktor perselisihan tetap mendominasi di angka 408 kasus, faktor ekonomi juga muncul sebanyak 99 kasus. Apalagi di masa pandemi Covid-19, banyak para suami yang terpaksa kehilangan pekerjaannya, hal ini berdampak besar terhadap perekonomian kerluarga dan menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga”

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Depok (22/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid menjelaskan bahwa tahun 2019 tingkat perceraian di usia produktif di Kota Depok dan Bekasi cukup tinggi.

Kerenanya, Nur Azizah menegaskan pentingnya edukasi tentang pengokohan ketahanan keluarga.

Hal ini disampaikan Nur Azizah dalam kegiatan Reses

Anggota DPR RI masa persidangan ke-5 tahun 2019-2020, Ahad (18/10/2020) di Ballroom Hotel Santika Kota Depok.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh sebagian penyuluh agama Islam non PNS ini dan pegawai KUA Kota Depok dan sekitarnya, Nur Azizah juga menjelaskan, peranan penyuluh agama menjadi penting untuk secara rutin menyampaikan materi ketahanan keluarga

kepada masyarakat.

Nur Azizah menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun Kantor Urusan agama (KUA) Kota Depok tahun 2018, 2019 dan 2020, angka kasus perceraian di Kota Depok tahun 2018 sebanyak 3.525 pasangan.

Tahun 2019 angka kasus perceraian meningkat 3,94% menjadi 3.644. Angka ini didominasi 2.799 gugatan dan 865 kasus talak. Sebanyak 77% kasus cerai gugat. Dan 576 kasus perceraian di tahun 2019 berasal dari pasangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok.

Rentang usia perceraian Kota Depok di usia 19-21 tahun sebanyak 62 kasus, usia 21-25 tahun sebanyak 560 kasus, usia 26-30 tahun sebanyak 1.470 kasus. Dan sisanya sebanyak 707 kasus terjadi pada usia 30-60 tahun.

“Artinya dominasi kasus ada pada usia produktif. Sebanyak 2.861 kasus terjadi akibat perselisihan, 425 kasus



meninggalkan pasangan dan faktor lainnya sebanyak 285 kasus. Melihat angka tersebut perselisihan yang menjadi penyebab utama, umumnya karena ketidak siapan pasangan dalam manajemen emosi pernikahan, hal ini ditugaskan kuat disebabkan karena kurangnya bekal edukasi pra nikah. Dimana calon pasangan tidak hanya harus matang secara fisik, tapi juga matang secara psikis agar mampu mengatasi problematika rumah tangga dengan bijak”, jelas Nur Azizah.

Nur Azizah menjelaskan hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan

secara finansial. Tercatat di tahun 2020 meskipun terjadi penurunan kasus dibandingkan tahun 2019.

“Selain faktor perselisihan tetap mendominasi di angka 408 kasus, faktor ekonomi juga muncul sebanyak 99 kasus. Apalagi di masa pandemi Covid-19, banyak para suami yang terpaksa kehilangan pekerjaannya, hal ini berdampak besar terhadap perekonomian kerluarga dan menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga”, terang Nur Azizah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Masa Reses, Anis Berdiskusi dan Berikan Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan PAUD

Salah satu tugas wakil rakyat adalah memastikan bantuan-bantuan Pemerintah dan Kemitraan sampai ke masyarakat. Ini adalah salah satu peran penting Anggota Dewan disamping peran-peran Konstitusi dan Legislasi

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (21/10) — Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Anis Byarwati, mendapatkan apresiasi saat reses dihadapan ketua-ketua Lembaga PAUD Non Formal Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur yang menerima Bantuan PAUD melalui Program PSBI (Program Sosial Bank Indonesia), Rabu (14/10/2020) lalu.

"Salah satu tugas wakil rakyat adalah memastikan bantuan-bantuan Pemerintah dan Kemitraan sampai ke masyarakat. Ini adalah salah satu peran penting Anggota Dewan disamping peran-peran Konstitusi dan Legislasi," ungkap Anis.

Melalui Program ini,

lanjutnya, lembaga-lembaga PAUD di Kecamatan Pulogadung mendapatkan bantuan dana penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) total sebesar Rp. 149 juta.

"Pengajuan bantuan yang dimulai awal tahun 2020 ini, telah dicairkan bulan Oktober 2020 dan telah digunakan untuk penyelenggaraan pengelolaan pendidikan dan pembelajaran di lembaga-lembaga yang berhak dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif," papar Anis.

Bantuan ini digulirkan Anis, sebagai wujud kepedulian akan pendidikan bangsa, khususnya pendidikan anak usia dini, sebagai dasar pendidikan pada jenjang selanjutnya.

"Sebagai bagian dari Pendidikan Bangsa, PAUD juga perlu dibina dan dibantu. Mendidik anak sejak dini (golden age) merupakan pilar membangun generasi yang tangguh, "belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu"; dampaknya sangat berpengaruh terhadap kualitas generasi masa depan", demikian Anis menyampaikan.

Melalui bantuan ini, diharapkan para lembaga PAUD dapat meningkatkan kualitas pengelolaan layanan pendidikan di lembaga masing-masing.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, para wakil dari lembaga-lembaga penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih dan rencana alokasi bantuan yang sesuai kebutuhan dan pengajuan mereka.

Rata-rata mereka adalah lembaga PAUD Non Formal yang bersifat sosial (non-profit), sehingga benar-benar membutuhkan bantuan, terutama di masa Pandemi saat ini.

Sebagian lembaga menggunakan bantuan untuk perbaikan/rehabilitasi gedung PAUD yang rusak karena banjir dan kondisi bangunan yang juga sudah rusak.



Sebagian ada yang digunakan untuk pengadaan sarana Laptop dan Media Belajar yang sangat mendesak di masa PJJ (pembelajaran jarak jauh) saat ini. Sebagian lagi ada yang diperuntukkan untuk tambahan honor guru yang tidak dibayarkan karena minimnya dana; dan lain-lain kebutuhan mendesak masing-masing lembaga.

Diakhir pertemuan yang berlangsung secara virtual, Anis berpesan agar para lembaga dapat tetap administrasi dan memanfaatkan bantuan ini

dengan sebaik-baiknya, serta memohon doa agar selaku wakil rakyat, ia senantiasa amanah dan diberi Allah kekuatan untuk berjuang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Amanah ini berat, bahu-gia rasanya saat bisa menuaikannya dan memberikan kemanfaatan antara lain dengan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti ini. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak program dan bantuan yang dapat diaksas." ujar Anis mengakhiri.

HNW Dukung PKS Luncurkan Marketplace Ummat di Pancoran

“Saya berharap perekonomian ummat bisa semakin baik, keislaman mereka semakin meningkat dan memberikan kontribusi dan kemaslahatan bagi warga Jakarta menghadapi pandemi covid-19 dengan segala dampaknya.

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (21/10) — Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II, Hidayat Nur Wahid, saat reses bertemu pimpinan dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta konstituen di Pancoran, Jakarta Selatan, meluncurkan marketplace ummat di Pancoran, Jakarta Selatan.

Peluncuran tersebut, menurut pria yang akrab disapa HNW ini, sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan dan ekonomi di era pademi Covid-19 ini.

HNW menuturkan bahwa

orientasi untuk mengokohkan ketahanan pangan dan ekonomi ummat ini telah didukungnya sejak awal, apalagi program ini juga digagas oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS).

“Saya sudah mengkampanyekan program ketahanan pangan berbasis kader ini, dan mendukung secara langsung penuksesannya di beberapa kecamatan seperti di Tebet, Cilandak, Gambir, Johar Baru, Kebayoran Lama, Mampang, Pasarminggu, Jagakarsa, dan kecamatan lainnya di Jakarta

Selatan dan Jakarta Pusat. Apalagi ini program nasional PKS,” ujarnya saat bertemu kader PKS dan tokoh masyarakat di Pancoran, Jakarta, secara virtual, Selasa malam (20/10).

Lebih lanjut, HNW mendukung kegiatan para kader PKS dan tokoh masyarakat di Pancoran, Jakarta Selatan ini, untuk memudahkan agar ummat saling ber-ta’awun atau dukung mendukung, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah.

“Saya berharap perekonomian ummat bisa semakin baik, keislaman mereka semakin meningkat dan memberikan kontribusi dan kemaslahatan bagi warga Jakarta menghadapi pandemi covid-19 dengan segala dampaknya,” ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) ini mengatakan program seperti ini juga membuktikan bahwa Partai Politik seperti yang dilakukan oleh PKS tidak hanya



peduli dengan suara dan atau pemilu saja, tapi PKS melaksanakan tugas dan janji kampanyanya dengan antara lain membela Rakyat baik terkait dengan perundangan dengan menolak UU Ciptaker dan RUU HIP, dan membuat RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, serta juga membela Rakyat dengan program-program yang memberdayakan ekonomi Rakyat disaat mereka kesusahan akibat covid-19.

Salah seorang tokoh masyarakat Pancoran, Prima Kumara mengapresiasi dukungan HNW selaku anggota DPR RI yang peduli terhadap perekonomian ummat yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.

Beberapa dampak dari pandemi tersebut, di antaranya, adalah perputaran ekonomi yang sangat lambat, terjadinya PHK, dan penghasilan yang sulit didapatkan.

Prima berharap agar kegiatan peluncuran marketplace ummat dapat berjalan dengan baik, untuk melanjutkan spirit ummat yang semangatnya semakin baik dari segi politik maupun ekonomi, pasca gerakan 212 beberapa waktu lalu.

Prima berpesan kepada para pelaku bisnis untuk bisa berkorban dan saling memahami satu sama lain dalam bertransaksi

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Reses Bersama Pimpinan Pemda Subang

Nurhasan Zaidi: Komunikasi dan Sinergi adalah Kunci

“Pembangunan Subang diperlukan adanya terjalin sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan elemen lainnya sehingga harapan dari pembangunan tersebut akan tercapai, komunikasi dan sinergi adalah Kunci

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Komisi VIII DPR RI

Subang (21/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Subang, Majalengka Sumedang, Nurhasan Zaidi, bertemu dengan segenap Pimpinan Daerah Kabupaten Subang di Rumah Dinas Bupati Subang dalam rangkaian kegiatan reses pada Jum'at (09/10/2020).

Turut hadir pula pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Agus Masykur, Kepala BPBD Kabupaten Subang Hidayat, Kemenag Subang Abdurrohman, Kabag Kesra Setda Subang Iwan, Perwakilan Kepala Dinas Sosial, dan Pimpinan Baznas Daerah Kabupaten Subang.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Nurhasan bersama

ajaran Pimpinan Pemda Kabupaten Subang membahas tentang perkembangan pelaksanaan program dan permasalahan terkait Bidang Komisi VIII antara lain keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di Subang. KPAI, BNPB, Baznas dan BWI.

Selain itu dalam diskusi tersebut juga di bahas tentang perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di kabupaten Subang serta penanggulangan bencana di Kabupaten Subang serta mengingat Subang masuk ranking 5 dalam resiko titik

rawan bencana di Jawa Barat, termasuk evaluasi pengawasan program pemerintah maupun daerah terkait bantuan sosial kepada masyarakat terdampak covid-19, perlindungan anak dan perempuan, serta penanggulangan generasi muda dari narkoba.

Dalam kesempatan tersebut Nurhasan Zaidi sangat memberikan apresiasinya terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Subang dalam keseriusan dan tanggung jawabnya membangun Subang.

“Ada kemajuan dan perubahan yang signifikan dalam pembangunan dan perhatian kepada masyarakat, mudah-mudahan kedepannya Subang menjadi lebih baik lagi” ujarnya.

“Pembangunan Subang diperlukan adanya terjalin sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan elemen lainnya sehingga harapan dari pembangunan tersebut akan tercapai, komunikasi dan sinergi adalah Kunci”, lanjutnya.

Nurhasan juga mengingatkan bahwa dengan



adanya Pelabuhan Patimdan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, diharapkan Subang mampu menyiapkan SDM yang handal sehingga nantinya Subang mampu bersaing dan masyarakatnya sendiri tidak terpinggirkan.

“Subang sangat potensial sekali dalam segala hal terutama sektor wisata, pertanian, industri dan pusat religinya dengan sudah didukungnya infrastruktur dan pendukung lainnya”, ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut Politisi PKS ini juga memberikan kesempatan kepada segenap pimpinan daerah yang hadir untuk menyampaikan aspirasi

serta temuan-temuan dilapangan untuk kemudian akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui mekanisme aspirasi dan advokasi untuk ditindak lanjuti yang berwenang.

“Prinsipnya, ini adalah bagian dari pelaksanaan fungsi kita sebagai wakil rakyat di pusat, yakni pengawasan dan anggaran. Insyaallah aspirasi yang telah disampaikan Pemda Subang, akan kami bawa untuk di komunikasikan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya, Bismillah, mohon do'anya semoga membawa masalah untuk semua”, pungkasnya.

Saat Reses di Dapil, Junaidi Bantu Masyarakat dengan Bagikan Ribuan Bibit Alpukat

Dengan ditanamnya bibit pohon alpukat ini diharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat desa dan juga bisa terus menjalin silaturahmi yang berkelanjutan

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Lampung (21/10) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly membagikan ribuan bibit Alpukat Mentega ke Masyarakat di Lampung Tengah dan Lampung Timur.

Menurut Junaidi, pembagian dan penanaman bibit pohon alpukat ini selain upaya menjaga kelestarian lingkungan juga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat desa.

"Dengan ditanamnya bibit pohon alpukat ini diharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat desa dan juga bisa terus menjalin silaturahmi yang berkelanjutan," ujar Junaidi di hadapan Perangkat dan Masyarakat Desa Rajabasa Lama, Labuhan

Ratu, Lampung Timur. Selasa, (20/10/2020)

Pembagian dan penanaman bibit pohon alpukat ini dilakukan di Pondok Pesantren El Firdaus, Lampung Tengah sebanyak 2000 bibit, Desa Rajabasa Lama II Kecamatan Labuhan Ratu sebanyak 1000 bibit, dan Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur sebanyak 1000 bibit.

Aleg PKS dari Dapil Lampung II ini mengatakan, kegiatan ini dilakukan atas kerjasama dengan lembaga masyarakat desa, pemerintah desa, dan masyarakat desa sebagai penyedia lahan.

Junaidi berharap program riil untuk masyarakat ini bisa

berkelanjutan dan berkembang ke desa-desa di kabupaten lainnya.

"Kami berharap bibit yang dibagikan dapat ditanam dengan perawatan yang baik sehingga penanaman ini bisa menjadi salah satu inovasi untuk menambah sumber pendapatan bagi masyarakat desa setempat," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Rajabasa Lama II Kecamatan Labuhan Ratu Bapak Jumadi mengatakan dukungan penuh dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak Junaidi Auly yang telah memprogramkan penanaman bibit alpukat untuk masyarakat di desanya.

"Program ini tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat di desa kami, semoga program ini bisa membawa dampak positif terhadap perekonomian desa dan silaturahmi bapak Junaidi sebagai wakil rakyat dengan masyarakat desa kami bisa terus terjalin," pungkasnya.



Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Panen

Sayur Pai Tsai

Tim Legislative Corner Fraksi PKS, DR. H. Mulyanto, M.Eng. dari Dapil Banten 3, panen Sayur Pai Tsai alias Pak Coy hidroponik di rumah, sebelum panen suara di arena Pilkada.

Pandemi Covid-19 menciptakan waktu luang dan kreativitas. Dapat sayur sehat dan kegembiraan bercocok tanam sekaligus. Berkah. Salam sehat untuk semua.

Wassalam.



Masa Reses,

Anggota Komisi V FPKS Terima Usulan dari Pemkab Maluku Tenggara

Tidak mesti kita berbicara Dapil terus, walau memang Dapil adalah prioritas. Namun terpenting adalah kita di Komisi V mengatur anggaran agar masing-masing daerah mendapatkan angka yang ideal. Agar pembangunan itu selaras dan seimbang

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (24/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi menerima kedatangan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun, di kediamannya pada Sabtu (24/10).

Kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan usulan pembangunan dan peningkatan jalan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Anggota Komisi V DPR RI tersebut.

Bupati Taher bersilaturahmi dengan Syahrul Aidi dalam

rangka mohon dukungan atas perjuangan peningkatan dan pembangunan dua ruas jalan di Maluku Tenggara yang kurang diperhatikan selama ini.

Dua ruas jalan tersebut adalah ruas jalan Elat-simpang Ngurdu-Fako-Holat-Ohoiraut sejauh 71,02 kilometer. Ruas ini merupakan ruas jalan provinsi yang diusulkan menjadi ruas jalan nasional.

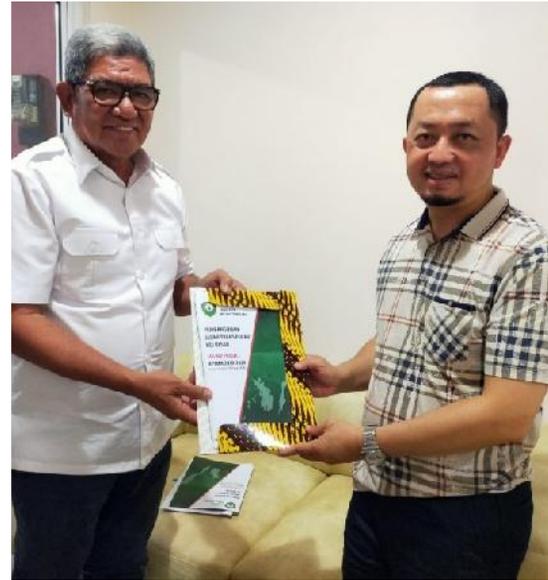
Dan ruas jalan simpang Ngurdu-Bombay-Ad-Ohoiraut

sejauh 59,70 kilometer, yang merupakan ruas jalan kabupaten diusulkan menjadi ruas jalan nasional. Total yang diusulkan 130,72 kilometer.

Usulan dua ruas jalan tersebut dalam rangka memperkuat pembangunan jalan trans pulau Kei Besar yang diusulkan masuk dalam major project RPJMN 2020-2024 yang sesuai dengan Perpres nomor 18 tahun 2020.

Syahrul Aidi menyambut baik kedatangan Bupati Maluku Tenggara tersebut. Walaupun di hari libur dan masa pandemi, namun itu tidak menghalangi niatnya untuk membantu daerah.

"Alhamdulillah pagi tadi saya telah menerima kedatangan Bupati Maluku Tenggara di kediaman. Bupati Taher bermaksud minta bantu dukungan atas pembangunan dan peningkatan dua ruas jalan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Selaku anggota Komisi V saya akan mengkaji



hal ini. Jika memang diperlukan dan mendesak maka akan kita sampaikan di Komisi V nantinya" kata Syahrul Aidi diujung telepon.

Saat ditanya Maluku Tenggara bukanlah Dapil dia, Syahrul menyampaikan jika sudah di DPR RI, maka yang harus diperjuangkan adalah kepentingan semua wilayah di Indonesia. Bagaimana caranya dengan anggaran yang ada,

semua daerah mendapatkan porsi yang ideal.

"Tidak mesti kita berbicara Dapil terus, walau memang Dapil adalah prioritas. Namun terpenting adalah kita di Komisi V mengatur anggaran agar masing-masing daerah mendapatkan angka yang ideal. Agar pembangunan itu selaras dan seimbang," tutup Syahrul Aidi.

Andi Akmal Terima Perwakilan Masyarakat Sulsel yang Dipimpin Ketua DPRD Provinsi

Saya bangga kepada kawan-kawan DPRD Sulsel yang telah bekerja dan berinisiatif untuk turut serta berkolaborasi dengan masyarakat menyampaikan aspirasinya. Ini adalah langkah demokrasi yang sehat dan elegan. Mestinya pemerintah menerima segala masukan untuk dipertimbangkan terutama masukan-masukan yang langsung dari masyarakat berkaitan dengan UU Cipta kerja yang berpolemik ini

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (23/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin menerima Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Muzayyin Arif yang memimpin rombongan legislator Sulsel di DPR RI.

Anggota Fraksi PKS DPR RI tersebut menerima di ruang rapat Pleno FPKS dan ruang kerjanya di gedung Nusantara 1, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Rombongan dari Sulawesi

Selatan ini membawa aspirasi masyarakat Sulsel terkait pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibuslaw yang hingga saat ini berpolemik meskipun sudah di sahkan.

"Saya bangga kepada kawan-kawan DPRD Sulsel yang telah bekerja dan berinisiatif untuk turut serta berkolaborasi dengan masyarakat menyampaikan aspirasinya. Ini adalah langkah demokrasi yang sehat dan elegan. Mestinya pemerintah menerima segala

masukan untuk dipertimbangkan terutama masukan-masukan yang langsung dari masyarakat berkaitan dengan UU Cipta kerja yang berpolemik ini", urai Akmal.

Anggota DPR yang duduk di Komisi IV ini berjanji akan menyampaikan segala aspirasi masyarakat Sulsel melalui DPRD Provinsinya, kepada pimpinan fraksi, yang selanjutnya akan di teruskan kepada pimpinan DPR RI.

Pada dasarnya, Akmal sepakat dengan seluruh aspirasi masyarakat, terkait UU Cipta kerja yang bermasalah ini. Ia pun menolak UU Cipta kerja karena berbagai substansi yang tidak sesuai dengan misi perbaikan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

"Banyak sekali pertanyaan di seluruh cluster yang sangat sulit di jelaskan apalagi di jaman akan membawa bangsa ini menuju negara yang lebih baik," ungkapnya.

Legislator Pusat asal Sulsel ini menyampaikan kepada perwakilan masyarakat Sulsel, bahwa RUU Cipta Kerja mulai dari pembahasan hingga pengesahan mendapat respon negatif dari berbagai kalangan.



Menurutnya, hampir semua ormas, bahkan NU dan Muhammadiyah, hingga perguruan tinggi merespon negatif.

"Ada beberapa hal yang ganjil dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini di antaranya dibahas dengan waktu yang sangat singkat. Hanya 6 bulan dan dibahas di badan legislatif tanpa melibatkan komisi dan tidak melibatkan beberapa stakeholder", tutur Akmal.

"Saya mengajak teman-teman semua, mulai dari seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, hingga DPRD untuk terus mencermati UU Cipta Kerja ini. Kontrol sekarang ada di rakyat. DPR sudah mayoritas mengikuti kemauan pemerintah. Kami PKS perlu dukungan rakyat untuk memperkuat kontrol Perbaikan negara ini", tutup Andi Akmal Pasluddin.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Usulnya Disetujui

HNW Kabarkan Pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis di MPR

“Tujuannya agar para tokoh masyarakat dan tokoh2 mudanya dengan contoh yang diberikan oleh pimpinan dan anggota MPR RI, dapat semakin mengenal untuk makin mencintai, menjaga, mengamalkan serta membela pilar-pilar tersebut di tengah peluang dan tantangan masa kini maupun masa yang akan datang, baik yang datang dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Wakil Ketua MPR RI

Usulnya Disetujui

HNW Kabarkan Pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis di MPR

kita memerlukan lembaga-lembaga yang terus menyuarakan, menegakkan dan mempraktek etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan berbangsa

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (25/10) — Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, MA mengungkapkan bahwa MPR RI akan segera membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis (MKM) sebagai simbol pada komitmen hadirkan etika dan guna menyerukan pentingnya praktek etika, moral dan akhlak dalam berbangsa dan bernegara dalam bingkai 4 pilar MPR RI, setelah usulannya terkait hal tersebut disetujui oleh para pimpinan MPR RI.

"Mahkamah tersebut bisa jadi simbol dan penguatan hadirnya komitmen beretika dalam melaksanakan 4 pilar MPR

RI dan bertujuan untuk mendorong dan mengawal lembaga MPR dan para pimpinan & anggota MPR RI itu bisa menjadi contoh dalam memegang prinsip etika, moral, dan akhlak dalam berbangsa dan bernegara," ujarnya saat menghadiri temu tokoh masyarakat yang diselenggarakan Ormas Garuda Keadilan Sumatera Barat secara virtual, Sabtu (24/10/2020).

Gagasan ini disambut baik oleh para tokoh masyarakat yang mengikuti agenda pertemuan tersebut. Walau digelar secara virtual, para tokoh masyarakat tetap

mengikutinya dengan semarak dari Sumatera Barat.

HNW sapaan akrabnya menyatakan bahwa 4 pilar MPR RI yang perlu dipahami lebih jauh oleh masyarakat adalah terkait pengenalan, pemahaman dan pengalaman Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

HNW menuturkan bahwa selain penting untuk dipahami, 4 pilar itu juga perlu diaktualisasikan dan dikontekstualisasikan agar para tokoh masyarakat dan kalangan tokoh2 pemuda nya dapat menerapkannya dalam tataran praktis.

"Tujuannya agar para tokoh masyarakat dan tokoh2 mudanya dengan contoh yang diberikan oleh pimpinan dan anggota MPR RI, dapat semakin mengenal untuk makin mencintai, menjaga, mengamalkan serta membela pilar-pilar tersebut di tengah peluang dan tantangan masa kini maupun masa yang akan datang, baik



yang datang dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri," jelasnya.

Selain itu, lanjut Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, diharapkan setelah sosialisasi spt ini para tokoh masyarakat dan tokoh mudanya juga dapat mendorong hadirnya komitmen menjaga dan menguatkan berNKRI sesuai dengan realisasi cita-cita proklamasi dan cita-cita reformasi.

"Apalagi untuk warga Minang, NKRI adalah warisan jihad dan jithah perjuangan tokoh Partai Islam Masyumi, yang berasal dari Minang,

beliau adalah M Natsir. Agar nanti NKRI itu dapat diwariskan dengan sebaik-baiknya kepada generasi milenial dan anak cucu saat nanti memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka," tukasnya.

HNW berpendapat bahwa hal tersebut dapat berjalan dengan baik, apabila para pemimpin bangsa dan juga tokoh masyarakat dapat menerapkan 4 pilar itu dalam semangat moral, etika, akhlak dalam berbangsa dan bernegara.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI